



**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN
ANGGARAN 2016-2020**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:
Fitri Dwi Komada
022117278

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2021

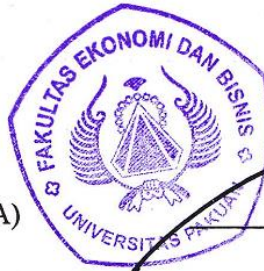
**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN
ANGGARAN 2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr.Hendro Sasongko., Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., C.A., CSEP., QIA)

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN
ANGGARAN 2016-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021

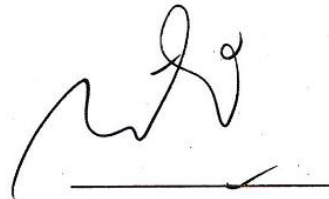
Fitri Dwi Komada

022117278

Disetujui:

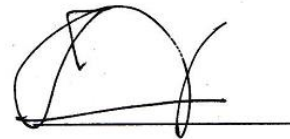
Ketua Penguji Sidang

(Dr. Retno Martanti Endah Lestari,
SE.,MSi.,CMA., CAPM)



Ketua Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M, CA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Agung Fajar Ilmiyono, S.E, M.Ak., AWP., CTCF.,
C.F.A., CNPHRP., CAP)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Dwi Komada

NPM : 022117278

Judul Skripsi : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN
ANGGARAN 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa paten dan Hak cipta dari produk skripsi di atas adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain entah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dan karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2021



Fitri Dwi Komada
0221 17 278

**© Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

FITRI DWI KOMADA. 022117278. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020. Di bawah bimbingan: YOHANES INDRAYONO dan AGUNG FAJAR ILMIYONO. 2021.

Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. *Value For Money* sangat penting dalam organisasi sektor publik karena memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan konsep value for money.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan mengambil data sekunder berupa LAKIP dan LKPD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020 dan data primer berupa wawancara dengan pihak Sekda dan BPKAD Kabupaten Cianjur. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value for money* menunjukkan bahwa, (1) dari elemen ekonomis dapat diketahui periode tahun anggaran 2016-2020 Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mampu melakukan penghematan dengan rasio ekonomis sebesar 92% untuk tahun 2016 dan 93% untuk tahun anggaran 2017 dan 2018; (2) dari elemen efisiensi anggaran dapat diketahui pada tahun 2016-2020 efisiensi anggarannya berada dalam kategori cukup efisien dengan masing-masing 89%, 82%, dan 84%, sedangkan efisiensi output terhadap input masing masing 83%, 83%, dan 92%; (3) dari elemen efektivitas pendapatan dapat diketahui jika pada tahun 2016-2018 pendapatan di Kabupaten Cianjur masuk kategori efektif karena berada diantara 90%-100% dengan masing-masing 95%, 99%, dan 98%. Sedangkan untuk tingkat efektivitas output terhadap target pada tahun 2016 dengan rasio 67% dan masuk kategori cukup efektif, dan untuk tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 93.81% dan 92% dan masuk kategori efektif karena berada dikisaran 90%-100%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, *Value For Money*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “**Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020**”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar menjadi lebih baik.

Penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
2. Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
3. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., C.F.A., CNPHRP., CAP. Selaku Asisten Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
5. Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M, CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan semangat demi kelancaran penulisan proposal ini.
6. Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., C.F.A., CNPHRP., CAP. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan Semangat demi kelancaran penulisan proposal ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan .
8. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ketulusan untuk membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan doanya yang tak terhingga sampai saat ini.

10. Kepada adik penulis, Farin Nazma Dwi Komada. Terima kasih untuk dukungan, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya.
11. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral dan materiil selama ini.
12. Dennis Meidy Haryanto, S.E yang selalu memberikan support, semangat dan tempat berkeluh kesah selama ini.
13. Alda, Dini, Rindayu, Demi, Dania sebagai tempat berkeluh kesah selama masa kuliah.
14. Sahabat penulis, Mila, Lilis, Wiwi, Hera sebagai tempat berkeluh kesah dan menemani saya dari dulu hingga sekarang.
15. Teman-teman Akuntansi kelas G 2017 yang telah memberikan support dan melengkapi perjalanan dari awal kuliah hingga saat ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Bogor, Juli 2021

penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Maksud Penelitian.....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.3.3. Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.4. Kegunaan Praktis	6
1.3.5. Kegunaan Akademis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Akuntansi Publik.....	8
2.1.2 Tujuan Akuntansi Publik.....	8
2.1.3 Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah	9
2.1.4 Keuangan Daerah.....	10
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	11

2.1.6 Pengukuran Kinerja Pemerintah.....	12
2.2 Kinerja Keuangan	14
2.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah	15
2.2.2 Value For Money	20
2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	24
2.3.1 Penelitian Terdahulu	24
2.3.3 Kerangka Pemikiran.....	60
2.4 Hipotesis Penelitian	62
BAB III METODE PENELITIAN	63
3.1 Jenis Penelitian	63
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	63
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	63
3.4 Operasionalisasi Variabel	64
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	65
3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data	65
BAB IV	68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Cianjur.....	68
4.1.2 Struktur Organisasi Kabupaten Cianjur	69
4.1.3 Visi Dan Misi Kabupaten Cianjur	70
4.1.4 Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur	70
4.1.5 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur	72
4.2 Data Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020.....	73
4.3 Analisis Data	74
4.3.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020.....	74
4.3.2 Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020.....	83
4.3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020.....	84
4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian	96
4.4.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020	96

4.4.2 Penerapan Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020	98
4.4.3 Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Valur For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020	101
BAB V.....	115
SIMPULAN DAN SARAN.....	115
5.1 Simpulan	115
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	19
Tabel 2.2 Kriteria Ekonomis	22
Tabel 2.3 Kriteria Efisien.....	23
Tabel 2.4 Kriteria Efektivitas	23
Tabel 2.5 Penelitian Sebelumnya.....	24
Tabel 2.6 Matriks Penelitian Terdahulu.....	58
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	63
Tabel 3.2 Kriteria Ekonomis	64
Tabel 3.3 Kriteria Efisien.....	65
Tabel 3.4 Kriteria Efektivitas	65
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun anggaran 2016-2020.....	72
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun anggaran 2016-2020	72
Tabel 4.3 Efektivitas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur	74
Tabel 4.4 Efisiensi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cianjur	75
Tabel 4.5 Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020.....	77
Tabel 4.6 Rasio Belanja Modal Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cianjur	77
Tabel 4.7 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur	79
Tabel 4.8 Rasio kemandirian pemerintah Kabupaten cianjur	80
Tabel 4.9 Rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020.....	82
Tabel 4.10 Rasio efisiensi pemerintah kabupaten cianjur Tahun 2016-2020	83
Tabel 4.11 Pengukuran Efisiensi Pada Sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur 2016	83
Tabel 4.12 Pengukuran Efisiensi Pada Sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur 2017	86
Tabel 4.13 Pengukuran Efisiensi Pada Sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur 2018	87
Tabel 4.14 Rasio efektivitas pemerintah kabupaten cianjur Tahun 2016-2020.....	89
Tabel 4.18 Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020	92
Tabel 4.19 Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020	92
Tabel 4.20 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020	93
Tabel 4.21 Pengukuran Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016- 2020.....	96
Tabel 4.22 Pengukuran Tingkat Efisiensi Pemerintah Kabupaten Cianjur.....	98
Tabel 4.23 Pengukuran tingkat efektivitas pemerintah kabupaten cianjur Tahun 2016-2020	102
Tabel 4.24 Pengukuran tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas Pemerintah kabupaten cianjur Tahun 2016-2020.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran.....	60
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Cianjur.....	68
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur	69
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur	70
Gambar 4.4 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Cianjur.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Uraian Pertanyaan Wawancara	123
LAMPIRAN 2 Dokumentasi Wawancara.....	124
LAMPIRAN 3 Surat Pengantar Penelitian Fakultas.....	124
LAMPIRAN 4 Surat Pengantar Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ...	124
LAMPIRAN 5 Surat Keterangan Penelitian di Sekretariat Pemerintah Daerah.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemberian otonomi daerah diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Karena dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat, (Mardiasmo, 2009:42)

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi, memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan daerahnya, dan pelayanan kepada sosial masyarakat. Halim (2013) menjelaskan bahwa Ciri utama suatu daerah

yang mampu melaksanakan otonomi yaitu, (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Peraturan Pemerintah No. 108/2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah menyarankan agar setiap akhir tahun anggaran, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan yang disampaikan antara lain: Laporan Realisasi Anggaran, Arus Kas, dan Neraca. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa: laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah.

Seiring berjalannya waktu organisasi sektor publik berkembang sangat pesat, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Namun, hal tersebut mengakibatkan munculnya fenomena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi baik dari pihak *internal* (organisasi) maupun pihak *eksternal* seperti pemerintah, dan masyarakat. Tuntutan ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik pelaksanaan *good governance* yang diberikan oleh United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009), meliputi partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), orientasi kepentingan umum (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi ke depan (*strategic vision*). Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2013: 9). Akuntabilitas sendiri bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang tersebut telah dibelanjakan, tetapi melingkupi kemampuan menunjukkan bagaimana uang tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan oleh organisasi sektor publik.

Kinerja keuangan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja menuntut semua pemerintah daerah untuk mampu menghasilkan kinerja keuangannya dengan baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi (Kurniawati, 2016: 735). Oleh sebab itu dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran.

Menurut Mardiasmo (2009 : 121) pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud tertentu. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja organisasi. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu organisasi berfokus pada tujuan programnya. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunitas kelembagaan. Menurut Mahmudi (2013:7), hasil pengukuran kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik).

Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, salah satunya menggunakan metode *Value for Money*. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga elemen utama dalam *Value for Money* yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Dari ketiga elemen pokok *Value for Money* tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup (Mardiasmo, 2009: 4). Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan berarti bahwa semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa diskriminasi atau hak istimewa bagi kelompok tertentu. Pemerataan atau kesetaraan berarti pemerintah harus menerapkan pemerataan 5 pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Penerapan konsep *value for money* penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat untuk menilai: efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya

pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih (2017) dengan judul “Pengukuran Kinerja Berbasis *value For Money* Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara” penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan SMP Negeri 2 Banjarnegara dengan menggunakan metode Value For Money. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan tabel kriteria ekonomis kinerja keuangan berada pada kriteria kurang ekonomis. (2) Tingkat efisiensi yang dicapai menunjukkan nilai 100 %, berdasarkan nilai kriteria efisiensi kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien. (3) Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria efektivitas kinerja keuangan berada pada kriteria efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek yang diteliti, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih (2017) objek penelitiannya yaitu SMP Negeri 2 Banjarnegara yang merupakan sebuah instansi pendidikan di Banjarnegara.

Sari (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010- 2013, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu sebesar 88,02 %, 89,98 %, 89,77 % dan 90,68%. Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 selalu mengalami peningkatan yaitu 99,44%, 96,55%, 95,36%, 92,91% dan berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif hanya sebesar 99,95 % dan kurang dari 100%, namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 100,84 %, 101,21 % dan 101, 28 % dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip value for money adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek yang diteliti, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) objek penelitiannya, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari Cianjurekspres.net mengemukakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2018, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun permasalahan yang menyebabkan opini WDP dari BPK adalah karena penemuan OTT Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendidikan Tahun Anggaran 2018, hal itu mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran di Kabupaten Cianjur belum dilakukan dengan optimal dan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat. WartaEkonomi.co.id juga menyebut bahwa Pengelolaan Aset di Kabupaten Cianjur belum optimal hal itu terlihat dari banyaknya aset yang masih tumpang tindih dengan OPD maupun Instansi lain.

Dalam kasus lain ayobandung.com memaparkan jika untuk meningkatkan infrastruktur pada tahun 2017 pemerintah kabupaten cianjur mengalami hambatan karena kurangnya anggaran. Sehingga pemerintah kabupaten cianjur harus melakukan efisiensi anggaran agar pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan menggunakan anggaran yang ada. Dengan hal ini pertanyaan yang muncul apakah penerapan *value for money* telah mendukung kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur?.

Maka dari itu dengan menerapkan konsep *value for money* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor publik dan masyarakat seperti: a.) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, b.) meningkatkan mutu pelayanan publik, c.) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, d.) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, e.) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan adanya fenomena, gap, perbedaan hasil penelitian dan masalah-masalah yang ada, maka dengan ini peneliti memutuskan untuk meneliti kembali dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2018”.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidakkonsistenan antara teori ataupun peraturan yang berlaku. Teori dan peraturan pemerintah tersebut menjelaskan agar pemerintah daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan menciptakan *good governance* atau pemerintahan yang baik agar tidak menjadi lahan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta karena adanya tuntutan baru yang muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Hal tersebut tidak sejalan dengan fakta yang ada di Kabupaten Cianjur yang mendapat opini (WDP) dari BPK karena temuan kasus OTT KPK atas Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Tahun Anggaran 2018, pengamanan dan pengelolaan aset yang belum optimal, juga terhambatnya perbaikan infrastruktur karena kurangnya anggaran sehingga perlu dilakukan efisiensi biaya. Adanya ketidaksejajaran tersebut memberikan ketertarikan

peneliti untuk meneliti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur menggunakan konsep *value for money*.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2018?
2. Bagaimana Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2018?
3. Bagaimana Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2018?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Untuk menganalisis kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara fakta/ pelaksanaan/ kondisi teori/ seharusnya/ peraturan/ standar mengenai suatu variable penelitian (Kinerja Keuangan dan Konsep *value for money*), menginformasikan hasil akhir dari penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020.
2. Untuk menjelaskan penerapan konsep Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020.
3. Untuk menjelaskan hasil analisis pengukuran kinerja keuangan dengan Menggunakan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020.

1.3.3. Kegunaan Penelitian

1.3.4. Kegunaan Praktis

Untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal lokasi penelitian dan pihak eksternal yang terkait.

1.3.5. Kegunaan Akademis

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Publik

Menurut Mardiasmo (2015:4) mendefinisikan akuntansi publik adalah akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik.”.

Menurut Ratmono (2017) Akuntansi publik adalah proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, serta membuat laporan keuangan pada organisasi sektor publik untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanya akuntansi publik maka mempermudah dalam pengambilan keputusan.

Awalnya Akuntansi Publik dinamakan Akuntansi Sektor Publik tetapi seiring berjalannya waktu istilahnya diubah menjadi Akuntansi Publik, Karena Penyebutan kata "sektor" menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Publik

Akuntansi publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi publik ini merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo (2009:14) tujuan akuntansi publik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan

penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).”

2.1.3 Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara tertulis, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

b. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi: Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

c. Unsur-Unsur APBD

Unsur-unsur APBD menurut Halim dan Kusufi (2012) adalah sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2.1.4 Keuangan Daerah

Menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan Daerah yang dikelola langsung adalah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain. Hak-hak tersebut akan meningkatkan keuangan daerah. Kewajiban dari keuangan daerah yaitu semua kewajiban mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan, Infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi.

Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan-penerimaan lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan

diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menggabungkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

b. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah-pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah.

c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan Pendapatan dana darurat.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Rosmery Elsy (2016:2) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang berbunyi “tiap-tiap Kementerian Negara/Lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”

Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dibekukan eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, yaitu:

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
- b. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan

2.1.6 Pengukuran Kinerja Pemerintah

Adapun pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan. *Rating* tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan dasar yang *reasonable* untuk pengambilan keputusan dan melalui pengukuran kinerja akan dapat dilihat seberapa jauh kinerja yang telah dicapai dalam satu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan dan dapat juga untuk mengukur kecenderungan dari tahun ke tahun (Khikmah, 2014:6).

Berikut manfaat pengukuran kinerja organisasi sektor publik (Mahsun, 2011: 149-150):

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk mencapai kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan masalah yang terjadi.

Menurut Mahmudi (2013:14), tujuan pengukuran kinerja adalah:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak. proses pengukuran dan penilaian kinerja akan menjadi sarana pembelajaran bagi semua pegawai organisasi melalui refleksi terhadap kinerja masa lalu, evaluasi kinerja saat ini, identifikasi solusi terhadap permasalahan kinerja saat ini dan membuat keputusan-keputusan untuk perbaikan kinerja yang akan datang.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (*achievement culture*) di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menciptakan atmosfer itu diperlukan perbaikan kinerja secara terus-menerus. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*)

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji, tujuan, dan promosi, atau *punishment* misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.

5. Memotivasi pegawai

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

6. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja merupakan salah satu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting baik bagi pihak internal maupun eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan suatu bagian dari sebuah proses, hasil dan daya guna. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, seperti lingkungan kerja, kelengkapan kerja, budaya kerja. Motivasi, kemampuan pegawai, struktur organisasi, kepemimpinan dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengkaji kinerja tidak lepas dari beberapa teori yang berhubungan dengan kinerja sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kinerja menurut Kristanti (2016) menyatakan bahwa “Suatu tahapan dalam pencapaian dari pelaksanaan kegiatan/program untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi atau perusahaan”.

Sedangkan menurut PP No. 8 Tahun 2006, menyatakan bahwa “kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.

Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai seseorang, unit kerja, dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika.

Dari pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu kemampuan perusahaan dalam mengelola aset maupun sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.

2.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Mohamad Mahsun (2012:135), Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:L-4). Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor (Abdul Halim 2012:L-4).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

- a. Rasio Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.

Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012:187), adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
 - 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
 - 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif
- b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio EKD} : \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi kinerja keuangan:

$\geq 100\%$ = tidak efisien

100% = efisiensi berimbang

$\leq 100\%$ = efisien

- c. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2007:236). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} : \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} : \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh

karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim 2007:241). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio pertumbuhan PAD :} \\ \frac{\text{realisasi pendapatan } t - \text{pendapatan tahun}(t-1)}{\text{realisasi pendapatan tahun}(t-1)} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan

Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{RKKD} : \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	delegatif

sumber: Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2.2 Value For Money

a. Pengertian Value For Money

Value For Money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Mahmudi (2005:89) value for money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana value for money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Value For Money adalah suatu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang memiliki tiga elemen utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:

1. Ekonomis

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi berarti sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut dapat berupa tenaga kerja (tenaga, keahlian, dan keterampilan), serta aset-aset seperti gedung, peralatan dan sebagainya.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

3. Efektifitas

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi berfokus pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).

b. Indikator Value For Money

Tuntutan masyarakat dalam Value For Money adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Peranan indikator kinerja pada Value For Money adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009:130). Mardiasmo (2009) juga membagi indikator value for money menjadi dua yaitu: Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisien) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik (spending less). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (spending well). Efektivitas adalah kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (spending wisely).

c. Manfaat Impelementasi Value For Money

Penerapan konsep Value For Money dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan Value For Money pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009:130).

Maka dari itu penerapan konsep Value For Money dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

d. Langkah-langkah pengukuran Value For Money

1. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis menggambarkan keterkaitan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Dimana rasio ekonomis merupakan perbandingan antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan. Mardiasmo (2009:4) ekonomis adalah perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauhmana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Indra Bastian (2006:280) mencontohkan biaya pembangunan rumah sakit dapat dikatakan ekonomis jika biaya yang digunakan dalam pembangunan lebih

rendah dari yang sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi belanja lebih kecil daripada target belanja yang ditetapkan.

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Ekonomis

Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
100%-keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996

2. Rasio Efisiensi

Mardiasmo (2009: 133) efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Sebagaimana dikatakan Halim (2007) bahwa efisiensi dalam rasio efisiensi berarti melihat perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan, dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Untuk menghitung efisiensi, digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

dan

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : keluaran yang dicapai dari suatu sasaran/program

Input : segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sasaran/program

Tabel 2.3 Kriteria Efisien

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100%-keatas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, kriteria efisiensi dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah harus merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien ataukah tidak (Amalia, 2015:35).

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009:134).

untuk menghitung Efektifitas, dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran Pendapatan}}{\text{target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan :

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
100%-keatas	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif.

2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.3.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variable yang diteliti	Metode analisis	Hasil penelitian
1	Purwanti (2017)	Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)	Value for money	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif	Hasil penelitian menunjukkan mengenai kinerja kegiatan fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.) Ditinjau dari rasio ekonomi, Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah mampu menjalankan pekerjaan secara ekonomis. 2.) Ditinjau dari rasio efisiensi, Kegiatan Fisik

					<p>Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah mampu menjalankan secara efisien.</p> <p>3.) Ditinjau dari rasio efektivitas, Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah menjalankan keseluruhan pekerjaannya dengan efektif</p>
2	Putra (2015)	Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan	Value for money	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dari tahun 2010 sampai 2013 berdasarkan value for money untuk penerimaan PAD adalah baik, karena memenuhi kriteria ekonomi,</p>

					efisiensi dan efektifitas.
3.	Wira (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bintan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money	Value For Money	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomi dan efisiensi telah tercapai, Dinas Sosial Kabupaten Bintan dapat mencapai hasil yang sangat efisien dan ekonomis. Namun, tingkat efektivitas program masih kurang sehingga dapat disimpulkan efektivitas dari program – program yang langsung menyentuh masyarakat belum maksimal
4	Indrayani (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota	Value For Money	Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini adalah Rasio ekonomis yang dihasilkan oleh pemerintah kota lhokseumawe

		Lhokseumawe Periode 2014-2016)			pada tahun tersebut dinilai ekonomis. Dikarenakan hasil rasio selama 3 tahun tersebut berada di bawah 100%. Dapat diketahui bahwa semakin rendah rasio ekonomi yang diperoleh maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya penghematan pada belanja operasi dan belanja modal seperti belanja barang, belanja peralatan dan mesin yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga untuk
--	--	-----------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>indikator rasio ekonomis Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah mencapai kinerja yang baik, karena dari tahun 2014-2016 (periode pengamatan), telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik. Pada tahun 2014 rasio efisiensi sebesar 94,69%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar 105,17%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 sebesar 97,95%. Yang berarti bahwa kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>2014 dinyatakan efisien. Sedangkan pada tahun 2015 rasio efisiensi berada >100% yang artinya pada tahun 2015 belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih besar dibandingkan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2015 tidak efisien karena rasio yang melebihi 100%. Kemudian tahun 2016, hal ini sama seperti pada tahun 2014 bahwa pada tahun 2016 rasionya kembali turun yang berarti efisien. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumaw</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>e telah efisien, yang berarti bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum. Dapat diketahui bahwa pada tahun pengamatan mulai 2014-2016 dengan nilai rasio 96,53%, 86,65%, 76,98% rasio efektifitas yang bernilai <100% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.</p>
5	Nazril (2013)	Penerapan Konsep Value For Money dalam Menilai	Value for Money	Penelitian ini menggunakan penelitian Metode	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa

		<p>Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar</p>		<p>analisis deskriptif kuantitatif</p>	<p>Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar telah memenuhi prinsip Value For Money yaitu ekonomis, Efisiensi, dan efektivitas. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis Dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengukur kinerja dengan Metode Value For Money. Perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					sedangkan penulis menilai kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
6	Adlyana, (2016)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) - Value for money (Y)	Penelitian ini menggunakan penelitian Assosiatif Kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini mengatakan Secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money, Secara parsial transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money, Secara parsial pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep

					value for money, Secara simultan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7	Enre (2020)	Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan	Value for Money	Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan masih tergolong belum sepenuhnya baik, karena indikator pengukurannya yaitu dari rasio ekonomis masih kurang ekonomis, rasio efisiensi tergolong kurang

					efisien, dan rasio efektivitas masih kurang efektif.
8	Sulastining sih, 2017	Pengukuran Kinerja Berbasis value For Money Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara	<i>Value for money</i>	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan tabel kriteria ekonomis kinerja keuangan berada pada kriteria kurang ekonomis. (2) Tingkat efisiensi yang dicapai menunjukkan nilai 100 %, berdasarkan nilai kriteria efisiensi kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien. (3) Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria

					efektivitas kinerja keuangan berada pada criteria efektif.
9	Sari, 2014	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Value for money	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010-2013, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu sebesar 88,02 %, 89,98 %, 89,77 % dan 90,68%. Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 selalu mengalami peningkatan yaitu 99,44%, 96,55%, 95,36%, 92,91% dan

					<p>berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif hanya sebesar 99,95 % dan kurang dari 100%, namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 100,84 %, 101,21 % dan 101, 28 % dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip value for money adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif.
10	Ardina, 2015	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Value for money	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan hasil analisis data pengukuran ekonomi pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Tahun 2013 kegiatan Pembinaan SDM di bidang hukum merupakan kegiatan dengan ekonomis

					<p>tertinggi 96% dengan penghematan Rp.1.460.000,-. Kegiatan yang mempunyai nilai ekonomi terendah yaitu pembinaan kerukunan hidup umat beragama karena realisasi anggarannya 100% yang berarti ekonomis berimbang. Pada tahun 2010 sampai dengan 2013, analisis rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 102.27% berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja negara tidak ekonomis karena belum memenuhi standar ekonomis VFM.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>Analisis rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 107.69% berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi menyebabkan rasio tidak memenuhi standar efisien VFM dan menunjukan bahwa dalam penggunaan dana anggaran belanja untuk mencapai program kerjanya masih belum tepat guna. Sedangkan pada rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72.05% berada dibawah 100%, sudah memenuhi standar efektivitas. Rasio efektivitas</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah terpenuhi
11	Pancanugraha, 2017	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso Tahun 2013-2014	Value for money	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan hasil analisis data pengukuran ekonomi pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Tahun 2013 kegiatan Pembinaan SDM di bidang hukum merupakan kegiatan dengan ekonomis tertinggi 96% dengan penghematan Rp.1.460.000,

					<p>-. Kegiatan yang mempunyai nilai ekonomi terendah yaitu pembinaan kerukunan hidup umat beragama karena realisasi anggarannya 100% yang berarti ekonomis berimbang. Pada hasil analisis data pengukuran efisien pada Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada periode Tahun 2013 Kegiatan Pembinaan SDM di bidang hukum merupakan kegiatan dengan efisiensi tertinggi 98% dengan output 100%. Tahun 2014 Kegiatan dengan nilai</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>efektivitas tertinggi ada pada kegiatan pembinaan administrasi umum mempunyai nilai efektivitas 98%, Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta kegiatan tentang pembinaan administrasi umum yang meliputi tata persuratan, dan arsiparis dengan target peserta sebanyak 100 orang namun yang terealisasi hanya 98 orang. Realisasi ini meningkat dari tahun 2013 yang hanya 96 orang. Sedangkan kegiatan dengan nilai efektivitas terendah yaitu kegiatan</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					pembinaan administrasi kepegawaian mempunyai nilai efektivitas 95%, walaupun terendah tapi masih dalam kategori sangat baik.
12	Polii, Saerang, Tangkumana, 2020	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money	Value for money	Metode penelitian yang digunakan berupa studi kasus dengan metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan konsep value for money yaitu dengan menggunakan rasio ekonomi,

					rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Rasio
13	Setiawan, A.Zamaludin, Anurul, 2020	Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value For Money Pada Satuan Kerja Balai Penelitian Tamanan Hias Kab. Cianjur	Value for money	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Balithitahun 2017 sampai dengan 2018 dapat dikatakan telah memenuhi syarat VFM itu ekonomi efisiensi dan efektivitas hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai rata-rata, efisiensi dan efektivitas yang diperoleh yang mencapai angka 60 sampai lebih dari 100% berdasarkan presentasi uraian pada bab sebelumnya. Rasio efisiensi menunjukan angka sebesar 64,44%

					<p>dikategorikan efisien pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan menjadi 164,42% hal ini dikategorikan sangat efisien, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Balithitahun 2017 mengalami peningkatan pada tahun 2018 dalam pengelolaan anggaran yang dialokasikan. Rasio efektivitas tahun 2017 sebesar 248,79% dan tahun 2018 sebesar 97,35% hal ini di kategorikan sangat efektif karena lebih dari 75%</p>
14	Sanjaya, 2019	Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Value for money	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan	Hasil analisis dan penelitian ini, yaitu: (1) Pada periode tahun 2016 dan 2017 ditinjau

				pendekatan deskriptif	<p>dari aspek ekonomis menunjukkan nilai perolehan pengukuran kinerja di katakan ekonomis atau hemat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya anggaran yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 66,74% dan 2017 sebesar 71,07%</p> <p>(2) Pada tahun 2016 dan 2017 didapatkan hasil yang ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja di katakan efisien</p> <p>(3) Pada tahun 2016 didapatkan hasil pengukuran kinerja ditinjau dari segi efektivitas</p>
--	--	--	--	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					dalam laporan kinerja menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja di katakan berhasil mencapai tujuan.
15	Ulfa, 2018	Analisis Kinerja Apbd Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015)	Value for money	Metode penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif	Hasil penelitian ini tampak bahwa tingkat efisiensi APBD yang masih kurang efisien, hal ini disebabkan karena belanja daerah menunjukkan lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga hasilnya selalu melebihi 80 persen. Lalu berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel 4.1. tingkat efektivitas APBD sangat efektif
16	Suwandi , Riharjo, 2017	Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Value For Money	Value for money	Metode penelitian yang digunakan	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan

				<p>dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>sebagai berikut: 1) Pada tahun 2014 dan tahun 2015 hasil pengukuran kinerja ditinjau dari segi ekonomis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja dapat dikatakan secara umum ekonomis atau hemat. Hal ini berdasarkan pada Badan Arsip dan Perpustakaan menjalankan semua programnya menggunakan dana seminimal mungkin tanpa harus mengorbankan salah satu dari kegiatan tersebut. ekonomis atau hemat adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan biaya yang</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang dicapai. 2) Ditinjau dari segi efisien kinerja pada tahun 2014 dan 2015 relatif efisien, karena empat program yang dijalankan menghasilkan 10 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai output yang dihasilkan dari program kerja Badan Arsip dan Perpustakaan kota Surabaya. Untuk menghasilkan output yang maksimal, Badan Arsip dan Perpustakaan tahun 2014 membiayai program-program kerjanya dengan dana sebesar Rp 20.843.082.7</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>02 padahal anggaran yang disetujui sebesar Rp 21.822.293.838 (seperti yang terlihat pada tabel 2). Pada tahun 2015 dengan menghasilkan output yang maksimal mereka membiayai program-program kerjanya dengan dana yang serendah rendahnya yaitu sebesar Rp 23.064.011.601 dari anggaran yang disetujui. 3) Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari segi efektivitasnya di tahun 2014 dan 2015 bahwa tingkat capaian kinerja yang dicapai dapat dikatakan efektif. Kinerja</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					dikatakan efektivitas jika outcome (dampak dari hasil kegiatan) berhasil dalam melakukan kegiatan dan tujuannya.
17	Sasmita, S. AP., M. A, 2020	Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kab. Oki Sumatera Selatan Periode 2017-2019	Value for money	Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjuka Rasio ekonomis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten OKI menunjukkan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2017-2019 bernilai 86,54%, 82,64%, 71,43%, menunjukkan bahwa rasio ini bernilai ekonomis. Sehingga untuk indikator rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten OKI sudah

					<p>mencapai kinerja yang baik, karena dari tahun 2017-2019 (periode pengamatan), telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik. Rasio efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten OKI cukup baik. Dimana pada tahun 2017 nilai rasio efisiensi yang di peroleh senilai 94,69% dan pada tahun 2018 naik menjadi 105,17% dan turun menjadi 97,95% pada tahun 2019, meskipun pada tahun 2018 menunjukkan rasio yang kurang efisien. Namun secara keseluruhan kinerja</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>Pemerintah Kabupaten OKI telah efisien, yang berarti bahwa pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum. Karena, suatu organisasi akan dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien.</p> <p>2. Rasio efektifitas pada Pemerintah Kabupaten OKI periode 2017-2019 dengan nilai rasio 96,53%, 86,65%, 76,98% rasio efektifitas</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					yang bernilai <100% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten OKI pada tahun tersebut dinilai tidak efektif. DAFTAR
18	Bayu, Sam, 2020	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Pemerintah Daerah Kabupaten Berau	Value for money	Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dalam bentuk studi kasus	Hasil penelitian 1. rasio ekonomis tahun anggaran 2013-2018 dengan rata-rata rasio ekonomisnya adalah 69%. 2. Rasio efisiensi tahun anggaran 2013-2018 dengan rata-rata rasio efisiensinya adalah 96% dari seluruh anggaran yang dihitung. Pemerintah Kabupaten Berau dinilai cukup

					<p>efisien serta cukup mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan</p> <p>3. Rasio efisiensi mengalami kenaikan dan penurunan dari rentang tahun 2013-2018.</p>
19	Ridwan, Anggrawati, 2017	Konsep Value For Money: Alternatif Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur	Value for money	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif	<p>Hasil penelitian ini diperoleh informasi proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Luwu timur berhasil menghemat anggaran sebanyak Rp 4.620.331.975,-. Ini memberikan indikasi ekonomi berdasarkan anggaran dan realisasi bahwa proyek tersebut bisa dikategorikan cukup ekonomis</p>

					<p>karena berhasil mencapai output tanpa menghabiskan anggaran yang ada. Dari perhitungan diperoleh nilai efisiensi proyek sebesar 97,34%, artinya dengan hanya menggunakan anggaran sebesar 97,34% mampu mencapai output sebesar 100%. Atau dengan kata lain program tersebut selesai 100% dengan menghabiskan anggaran sebanyak 97,34% dari anggaran yang ada. Dari segi keefektifan menunjukkan bahwa program pembangunan jalan dan</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur Tidak efektif, hal ini menggambarkan bahwa meskipun output yang dihasilkan telah mencapai target output yang maksimal yaitu 100 %, akan tetapi tingkat pencapaian outcome dari program pembanguna jalan dan jembatan secara umum belum mencapai target sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah atau dengan kata lain belum memuaskan publik atau pelanggan secara maksimal.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20	Ilmiyono, 2017	Pengaruh Kinerja Keuangan dan Faktor Ekonomi Makro Dalam Memprediksi Volatilitas Harga Saham Perusahaan Subsektor Industri Food And Beverages	Kinerja keuangan (X1) Faktor ekonomi makro (X2) Harga Saham Volatilitas harga saham	Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling	Hasil penelitian ini bahwa ROA, DER, dan AKB secara parsial tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%). Begitu juga variabel makro ekonomi berupa inflasi, nilai tukar, dan suku bunga secara parsial tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%).
----	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data diolah Peneliti, 2021

Berikut ini tersaji ringkasan tabel matriks penelitian terdahulu tentang *value for money*:

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2018

Tabel 2.5 Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variable	
		Value for Money	

		Ekonomi	Efisien	Efektif	Kinerja Keuangan
1.	purwianti, 2017	✓	✓	✓	✓
2.	putra, 2017	✓	✓	✓	✓
3.	wira, 2014	✓	✓	✓	✓
4.	Indrayani, 2018	✓	✓	✓	✓
5.	Nazril, 2014	✓	✓	✓	✓
6.	adlyana, 2016	✓	✓	✓	✓
7.	enre, 2020	✓	✓	✓	✓
8.	Sulastiningsih, 2017	✓	✓	✓	✓
9.	sari, 2014	✓	✓	✓	✓
10.	ardina, 2015	✓	✓	✓	✓
11.	pancaanugrah, 2017	✓	✓	✓	✓
12.	Polii et al, 2020	✓	✓	✓	✓
13.	Setiawan, A.Zamaludin, 2020	✓	✓	✓	✓
14.	Sanjaya, 2019	✓	✓	✓	✓
15.	Ulfa, 2018	✓	✓	✓	✓

16.	Suwandi , Riharjo, 2017	✓	✓	✓	✓
17.	Sasmita, S. AP., M. A, 2020	✓	✓	✓	✓
18.	Bayu, Sam, 2020	✓	✓	✓	✓
19.	Ridwan, Anggrawati , 2017	✓	✓	✓	✓
20.	Ilmiyono, 2017				✓

2.3.3 Kerangka Pemikiran

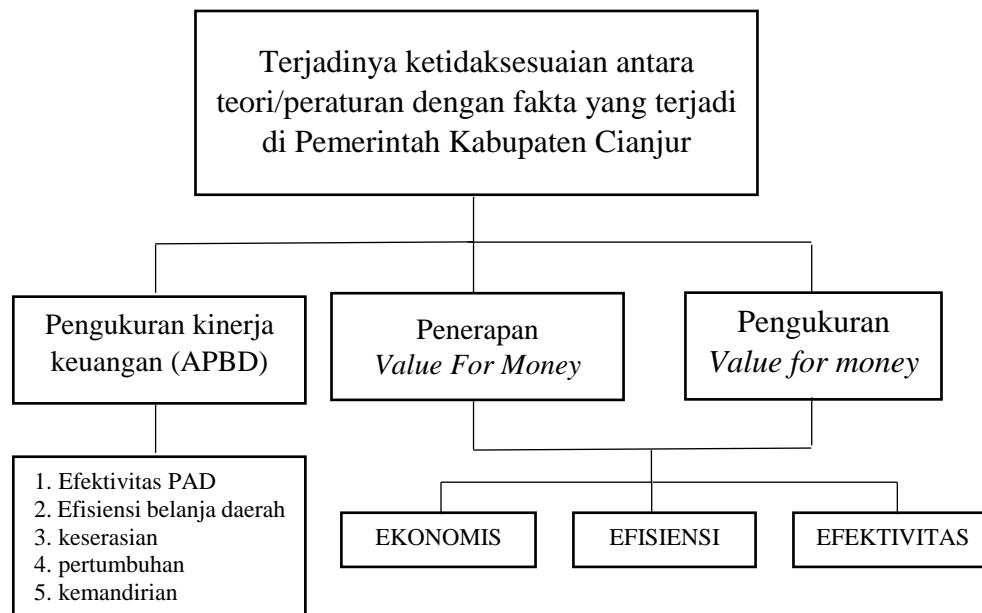
Menurut Mardiasmo (2009), tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan Value For Money yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Value For Money menjelaskan hubungan yang sangat erat antara sumber daya dan manfaat ataupun hasil yang disampaikan melalui proses yang mengubah input melalui aktivitas kegiatan menjadi output yang diperlukan untuk memicu hasil (outcome) yang baik.

Sejalan dengan peraturan untuk pengelolaan anggaran daerah (APBD), dalam PP Nomor 105/2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang memunculkan tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran salah satunya yaitu lebih menerapkan konsep value for money yang artinya dalam mencari maupun menggunakan dana, pemda dituntut selalu menerapkan prinsip 3E (Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas) tersebut. Hal ini mendorong pemda untuk selalu memperhatikan tiap sen/rupee dana (uang) yang diperoleh dan digunakan.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemampuannya mengelola kinerja keuangannya sendiri. Semakin baik pengelolaan keuangan di suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu mewujudkan *good governance* salah satunya dengan menerapkan prinsip 3E (ekonomis, efektif, efisien) / *value for money*.

Maka dari itu penting sekali pengimplementasian konsep *value for money* karena memiliki manfaat bagi sektor publik antara lain: a) meningkatkan hak pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, b) meningkatkan mutu pelayanan publik, c) untuk meminimalisir pelayanan publik

dikarenakan inefisiensi yang hilang dan penghematan pemakaian input, d) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, e) meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo: 2009). Dengan melihat hal tersebut diatas maka peneliti akan mencoba mengukur seberapa besar rasio ekonomi, efisien, dan efektifnya Kinerja Keuangan di Pemerintah Kabupaten Cianjur?



Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran

Value For Money menjelaskan hubungan yang optimal antara biaya/sumber daya serta manfaat/hasil yang disampaikan melalui proses yang mengubah input melalui aktivitas kegiatan menjadi *output* yang diperlukan untuk memicu atau menghasilkan (*outcome*) yang baik (kuswanti, 2014:29).

Kerangka pemikiran diatas maka dijabarkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian
2. Ekonomis terkait konsep biaya untuk memperoleh unit input dalam hal ini realisasi pengeluaran di bandingkan dengan anggaran pengeluaran.
3. Efisiensi melihat perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan dalam hal ini realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan.
4. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, dalam hal ini realisasi pendapatan dibandingkan dengan target anggaran pendapatannya.

5. *Input* adalah realisasi belanja untuk sasaran kegiatan Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2020.
6. *Output* adalah hasil persentase perhitungan realisasi fisik dari setiap sasaran kegiatan yang sudah direncanakan dalam Laporan Kinerja mengenai Realisasi kegiatan tahun 2016-2020.

Penjabaran diatas dijadikan pedoman untuk menjawab rumusan masalah dengan cara menghitung dan mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan menggunakan konsep value for money sehingga akan diperoleh hasil mengenai pengelolaan kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

2.4 Hipotesis Penelitian

Dikarenakan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research) merupakan penelitian masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Supomo and Nur, 2009). Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mix method*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:18) *mix method* adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif.

Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian studi kasus. Metode studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020).

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal (variable tertentu). Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan dan *Value For Money*.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berupa *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan dari divisi/organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Lokasi penelitian merupakan tempat variable dianalisis. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Cianjur yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 40, Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat 43211.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis datanya bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, pada penelitian ini dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan melalui wawancara tentang kinerja keuangan dan penerapan konsep value for money di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Prima Herviani/Sekda) dan Kepala Bidang Anggaran (Yane Diane/BPKAD)
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain, seperti halnya majalah koran, artikel, jurnal dan publikasi

lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang didapatkan dari website resmi www.cianjur.go.id

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variable	Indikator	Ukuran	Skala
Kinerja keuangan	1. Efektivitas	Efektivitas PAD $= \frac{\text{Realisasi Pendapatan daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100\%$	RASIO
	2. Efisiensi belanja daerah	EKD $= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	
	3. Keserasian	Belanja Operasi $= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ Belanja Modal $= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	
	4. Pertumbuhan	pertumbuhan PAD $= \frac{\text{realisasi pendapatan } t - \text{pendapatan tahun}(t-1)}{\text{realisasi pendapatan tahun } t-1} \times 100\%$	
	5. Kemandirian	RKKD $= \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$	
Value For Money	1. Indikator Alokasi Biaya (Ekonomis dan Efisiensi) 2. indikator kualitas kinerja (efektivitas)	Ekonomis $= \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100\%$ Efisiensi $= \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\%$ Efisiensi = $\frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$ Efektivitas $= \frac{\text{Realisasi anggaran Pendapatan}}{\text{target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$	

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	UKURAN
Kinerja keuangan	Faktor-faktor penghambat	Identifikasi dan evaluasi faktor penghambat kinerja
Value For Money	1. alokasi biaya (Ekonomis dan Efisiensi) 2. kualitas kinerja (efektivitas)	1. Pengadaan sumber daya dilihat dari kualitas tertinggi dengan harga terendah 2. Pengalokasian sumber daya secara tepat 3. Kualitas barang dan jasa 4. Pemeliharaan sumber daya dengan optimal 5. Menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang di miliki

		6. Identifikasi dan Evaluasi penghambat keberhasilan organisasi 7. Alternatif lain untuk melaksanakan tujuan 8. Pengukuran prospektif perencanaan kinerja 9. Pengukuran retrospektif penilaian kinerja 10. Pertanggungjawaban efektivitas program
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data kemudian di analisis. Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sedangkan data primer didapatkan melalui:

1. Observasi adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah teknik analisis deskriptif dengan melalui tahapan terhadap dokumentasi terdahulu.

Pada tahap awal penelitian ini dilakukan pengumpulan data sampel melalui sumber data berupa dokumen laporan keuangan, kemudian data tersebut diolah dan dihitung dengan menggunakan rasio guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan. Hasil perhitungan rasio yang sudah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk analisis deskriptif guna menjelaskan makna dari angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut.

Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio *Value for Money* dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cianjur Tahun Anggaran 2016-2018. Adapun tolak ukur yang dapat digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Pengukuran Ekonomi

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Ekonomis

Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
100%-keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Tidak Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996

2. Pengukuran Efisiensi

Untuk menghitung efisiensi, digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

Tabel 3.3 Kriteria Efisien

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100%-keatas	Sangat Efisien
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Tidak Efisien
Kurang dari 60%	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996

3. Pengukuran Efektivitas

untuk menghitung Efektifitas, dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan :

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

Tabel 3.4 Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
100%-keatas	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Tidak Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif.

Sedangkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil wawancara di lapangan untuk selanjutnya di deskripsikan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman:1992) dalam sugiyono (2015, hlm, 246)

Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam teknik analisis data ini adalah :

1. Collecting/Pengumpulan data, berkaitan dengan laporan kinerja instansi dan laporan keuangan daerah yang diperoleh dari hasil observasi.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada laporan kinerja pemerintah. Terlebih dahulu peneliti mengklarifikasi data laporan kinerja yang telah diperoleh, kemudian mengolah serta menghubungkan semua data yang telah diperoleh dengan teori yang ada. Pengukuran kinerja keuangan ditinjau menggunakan metode value for money dengan menghitung rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dengan menggunakan data yang diperoleh.
3. Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berupa analisis dalam bentuk uraian singkat, sehingga peneliti dapat menguasai data. Penyajian data ini dilakukan dengan evaluasi kinerja keuangan berdasarkan laporan kinerja instansi yang telah dianalisis.
4. Penarikan kesimpulan, melakukan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Value for Money dalam pengukuran kinerja keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur secara astronomis terletak pada koordinat 106^o 42' - 107^o 25' Bujur Timur dan 6^o 21' - 7^o 25' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0-40%, secara geografisnya terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta).

Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21'' – 7025'' Lintang Selatan dan 106042''-107025'' Bujur Timur. Dengan Batas-batas wilayah daerah meliputi:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
2. Sebelah timur berbataan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra hindia;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dengan luas wilayah 361.434,98 ha terdiri dari 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa serta 2.754 Rukun Warga (RW) dan 10.402 Rukun Tetangga (RT) dengan penduduk berjumlah 2,260 juta* jiwa.*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur

Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Cidaun dengan luas 29.551,23 ha, sedangkan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Cianjur hanya dengan luas 2.614,70 ha.

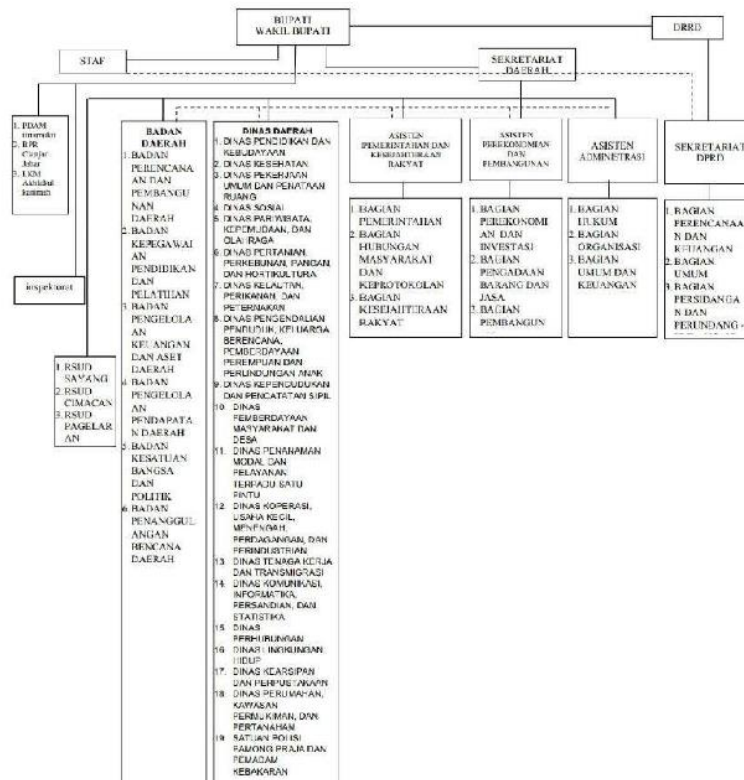
Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Cianjur Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan struktur tanah yang labil sering terjadi tanah longsor dan merupakan daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya merupakan area perkebunan dan persawahan. Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah, serta terdapat banyak bukit-bukit yang diselengi oleh pegunungan yang melebar sampai ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti halnya Cianjur bagian tengah, bagian selatan pun tanahnya labil dan sering terjadi longsor serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu luas, Cianjur selatan terdapat areal perkebunan dan persawahan.



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Cianjur

4.1.2 Struktur Organisasi Kabupaten Cianjur

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur meliputi organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Cianjur yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur

4.1.3 Visi Dan Misi Kabupaten Cianjur

Visi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dari visi akan dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas kemana suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. visi pembangunan Kabupaten Cianjur untuk kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2021 adalah “Cianjur Lebih Maju dan Agamis” Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

Lebih maju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

Agamis: pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Misi Pembangunan Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

4.1.4 Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur

4.1.4.1 Gambaran Umum Organisasi

A. Tupoksi

Susunan organisasi serta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi tentang pengendalian dan interaksi antara pimpinan dan bawahan serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat

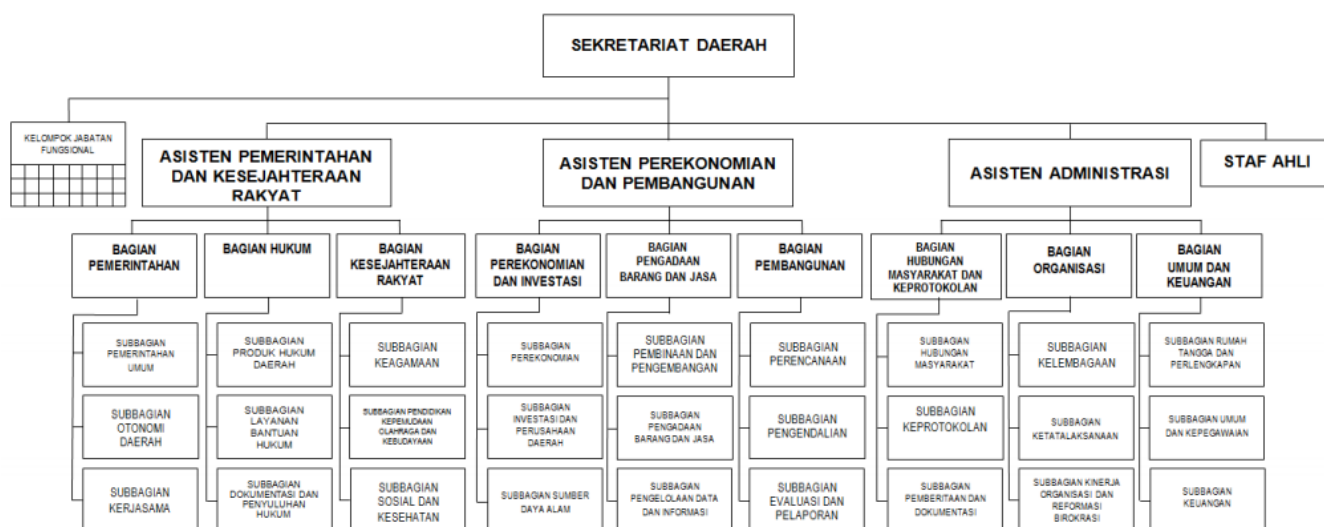
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, bahwa Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekda, 3 (tiga) Assisten Daerah, 9 (sembilan) Kepala Bagian, Staf Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4) Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah; dan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2020, berdasarkan pada prosedur kerja Sekretariat Daerah di atas, maka tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dibebankan pada 41 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/a = 0; II/b = 6 jabatan, Eselon III/a = 8 jabatan dan Eselon IV/a = 27 jabatan. Adapun jumlah total pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebanyak 109 orang.

Berdasarkan penjabaran di atas serta pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi sekretariat daerah dapat digambarkan struktur organisasi Sekretariat Daerah sampai tingkat eselon II sebagai berikut :



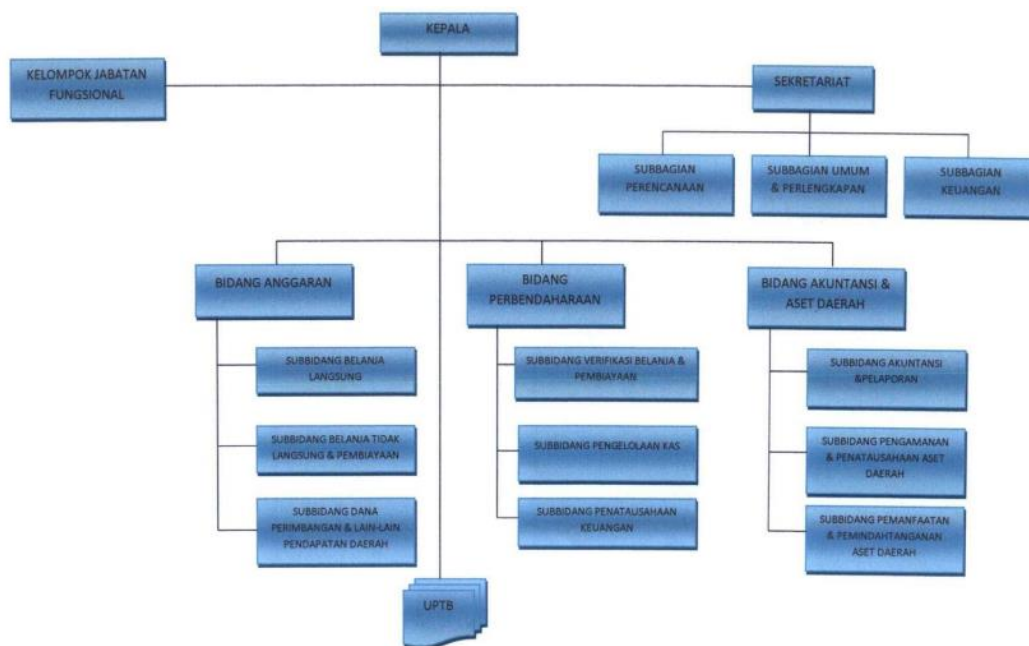
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur

4.1.5 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, yaitu Bidang Akuntansi dan aset daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Anggaran.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur mengacu pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.



Gambar 4. 4 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Cianjur

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan. Sedangkan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset

- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan.
- f. Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Data Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun anggaran 2016-2020

TAHUN	PENDAPATAN		%
	ANGGARAN	REALISASI	
2016	3,354,856,301,382.73	3,471,276,552,063.69	103%
2017	3,803,680,476,293.55	3,764,267,630,006.53	99%
2018	4,085,021,388,832.55	4,017,389,955,771.68	98%
2019	4,090,606,786,847.00	3,995,406,433,639.81	98%
2020	3,967,366,428,102.00	3,840,501,662,318.66	97%

Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur, 2021

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pendapatan daerah kabupaten cianjur dari tahun ketahun mengalami fluktuasi yaitu pendapatan pada tahun 2016 terealisasi sebesar 103% melebihi target yang dianggarkan. Realiasasi pendapatan pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu terealisasi sebesar 99%. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 realisasi pendapatan kabupaten cianjur mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 98%, lalu disusul oleh tahun 2020 yang mengalami penurunan kembali menjadi 2020.

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun anggaran 2016-2020

TAHUN	BELANJA		%
	ANGGARAN	REALISASI	
2016	3,157,735,114,967.75	2,898,919,130,797.00	92%
2017	3,307,389,462,129.42	3,074,361,632,933.00	93%
2018	3,634,827,728,775.95	3,364,476,600,631.00	93%
2019	3,628,474,340,995.08	3,279,666,159,526.12	90%
2020	3,516,809,427,971.77	3,206,600,721,623.74	91%

Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur, 2021

Berdasarkan table 4.2 menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana belanja pada tahun 2016 terealisasi sebesar 92%. Sedangkan pada tahun 2017 belanja terealisasi sebesar 93%. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi belanja daerah cianjur kembali memperoleh sebesar 93%. Lalu pada tahun 2019 anggaran belanja Kabupaten Cianjur terserap sebesar 90% dan pada tahun 2020 sebesar 91%.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020

Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Dan Rasio Pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam menghitung rasio-rasio diatas adalah Laporan Realiasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Cianjur yang di dapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Adapun hasil dari pengukuran rasio tersebut adalah:

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.

Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{3.241.659.038.317.00}{3.401.960.089.236.73} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3.764.267.630.006.53}{3.803.680.476.293.55} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{3.573.272.763.448.68}{3.777.459.330.002.29} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{3,995,406,433,639.81}{4,090,606,786,847.00} \times 100\%$$

$$= 98\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{3,840,501,662,318.66}{3,967,366,428,102.00} \times 100\%$$

$$= 97\%$$

Tabel 4.3 Efektivitas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Tahun	Realisasi	Anggaran	Efektivitas
2016	3,241,659,038,317.00	3,401,960,089,236.73	95%
2017	3,764,267,630,006.53	3,803,680,476,293.55	99%
2018	3,573,171,763,448.68	3,777,459,330,002.29	95%
2019	3,995,406,433,639.81	4,090,606,786,847.00	98%
2020	3,840,501,662,318.66	3,967,366,428,102.00	97%

Sumber: Data diolah Peneliti, 2021

Dapat dilihat dari tabel 4.3 rasio efektivitas atas pendapatan daerah tahun 2016-2018 mengalami peningkatan tetapi untuk tahun 2018 mengalami penurunan kembali. Untuk 2016 rasio efektivitas sebesar 95% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 99% akan tetapi masih berada di kategori tidak efektif karena masih berada di bawah 100%. Selanjutnya pada tahun 2018 rasio efektivitas kabupaten cianjur mengalami penurunan yaitu sebesar 95% dan masih berada dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Selanjutnya pada tahun 2019 rasio efektivitas kabupaten cianjur masih berada pada kategori tidak efektif rasionya sebesar 98% dan pada tahun 2020 kembali mendapatkan kategori tidak efektif karena rasio nya sebesar 97%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah dalam rangka mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan tingkat realisasinya atas pendapatan daerah cenderung berfluktuasi, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang berfluktuasi. Dengan tidak stabilnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur belum stabil.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat

dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

Kinerja pemerintah daerah kabupaten cianjur dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah kabupaten cianjur.

Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} : \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2,898,919,130,797.00}{3,241,659,038,317.} \times 100\%$$

$$= 89\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3,074,361,632,933.00}{3,764,267,630,006.53} \times 100\%$$

$$= 82\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{3,364,476,600,631.00}{4,017,389,955,771.68} \times 100\%$$

$$= 84\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{3,279,666,159,526.12}{3,995,406,433,639.81} \times 100\%$$

$$= 82\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{3,206,600,721,623.74}{3,840,501,662,318.66} \times 100\%$$

$$= 83\%$$

Tabel 4.4 Efisiensi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Tahun	Belanja daerah	Pendapatan daerah	Efisien
2016	2,898,919,130,797.00	3,241,659,038,317.00	89%
2017	3,074,361,632,933.00	3,764,267,630,006.53	82%
2018	3,364,476,600,631.00	4,017,389,955,771.68	84%
2019	3,279,666,159,526.12	3,995,406,433,639.81	82%

2020	3,206,600,721,623.74	3,840,501,662,318.66	83%
------	----------------------	----------------------	-----

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Dapat dilihat dari tabel 4.4 untuk belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan untuk tingkat realisasi Pendapatan Daerah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2016 Rasio Efisiensi sebesar 89% yang termasuk dalam kategori efisien karena berada dibawah 100%.

Sedangkan untuk tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar 82% dan masih dalam kategori efisien karena berada dibawah 100%. Untuk tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 84% dan masih berada pada kategori efisien karena berada dibawah 100%. Pada tahun 2019 rasio efisiensinya kembali berada dalam kategori efisien karena mendapatkan rasio sebesar 82% dan pada tahun 2020 rasio nya sebesar 83% dan masuk kategori efisien.

Melalui pengukuran efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. Dengan perhitungan Rasio Efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Untuk Belanja Daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu berada di kategori efisien. Dengan stabilnya rasio efisiensi atas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, menunjukkan bahwa kinerja dari Belanja Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur sudah dinilai baik.

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2007:236). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} : \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{2,282,140,271,976.00}{2,898,919,130,797.00} \times 100\% \\ &= 79\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{2,249,814,919,299.00}{3,074,361,632,933.00} \times 100\%$$

$$= 73\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2,434,088,944,453.00}{3,364,476,600,631.00} \times 100\%$$

$$= 72\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2,584,281,087,455.12}{3,279,666,159,526.12} \times 100\%$$

$$= 79\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{2,709,525,819,584.74}{3,206,600,721,623.74} \times 100\%$$

$$= 84\%$$

Tabel 4.5 Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja operasi	Belanja daerah	Rasio belanja operasi
2016	2,282,140,271,976.00	2,898,919,130,797.00	79%
2017	2,249,814,919,299.00	3,074,361,632,933.00	73%
2018	2,434,088,944,453.00	3,364,476,600,631.00	72%
2019	2,584,281,087,455.12	3,279,666,159,526.12	79%
2020	2,709,525,819,584.74	3,206,600,721,623.74	84%

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2020 dilihat dari tabel 4.5 Keserasian Belanja Daerah, secara umum dapat dikatakan sebagian kecil dana Belanja Daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata sebesar 75% untuk Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja.

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 84%, sedangkan Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 72%.

$$\text{Rasio Belanja Modal} : \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{616,244,510,821.00}{2,898,919,130,797.00} \times 100\% \\ &= 21\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{823,214,700,634.00}{3,074,361,632,933.00} \times 100\% \\ &= 27\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{928,610,308,238.00}{3,364,476,600,631.00} \times 100\% \\ &= 28\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{690,653,593,571.00}{3,279,666,159,526.12} \times 100\% \\ &= 21\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{384,911,926,929.00}{3,206,600,721,623.74} \times 100\% \\ &= 12\% \end{aligned}$$

Tabel 4.6 Rasio Belanja Modal Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Tahun	Belanja modal	Belanja daerah	Rasio belanja modal
2016	616,244,510,821.00	2,898,919,130,797.00	21%
2017	823,214,700,634.00	3,074,361,632,933.00	27%
2018	928,610,308,238.00	3,364,476,600,631.00	28%
2019	690,653,593,571.00	3,279,666,159,526.12	21%
2020	384,911,926,929.00	3,206,600,721,623.74	12%

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Dapat dilihat dari tabel 4.6 untuk belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Begitu juga untuk Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 rasio belanja modal sebesar 21% dalam keadaan cukup baik dikarenakan proporsinya berada lebih besar dari 20%. Untuk tahun 2017 rasio belanja modal mengalami peningkatan menjadi 27% dan dapat dikatakan cukup baik karena proporsinya berada lebih besar dari 20%. Untuk tahun 2018 rasio belanja modal kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 28% dan dikatakan cukup baik karena berada lebih besar dari 20%. Sedangkan pada tahun 2019 rasio belanja modal terhadap total belanja daerah nya yaitu sebesar 21% dan pada tahun 2020 merupakan serapan belanja modal paling rendah karena hanya sebesar 12%.

Melalui analisis rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Cianjur dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten cianjur guna untuk membiayai modal perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan di Kabupaten Cianjur.

Untuk pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk tahun 2016-2018 masih dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten cianjur dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Rumus menghitung rasio pertumbuhan pendapatan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi pendapatan } t - \text{pendapatan tahun}(t - 1)}{\text{realisasi pendapatan tahun } t - 1} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{3,241,659,038,317.00 - 3,114,043,188,213.81}{3,114,043,188,213.81} \times 100\%$$

$$= 4\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3,764,267,630,006.53 - 3,241,659,038,317.00}{3,241,659,038,317.00} \times 100\%$$

$$= 16\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{4,017,389,955,771.68 - 3,764,267,630,006.53}{3,764,267,630,006.53} \times 100\%$$

$$= 7\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{3,995,406,433,639.81 - 4,017,389,955,771.68}{4,017,389,955,771.68} \times 100\%$$

$$= -0.55\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{3,840,501,662,318.66 - 3,995,406,433,639.81}{3,995,406,433,639.81} \times 100\% \\ &= -3.88\% \end{aligned}$$

Tabel 4.7 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Tahun	Pendapatan awal	Pendapatan akhir	Rasio pertumbuhan
2015	-	3,114,043,188,213.81	0
2016	3,114,043,188,213.81	3,241,659,038,317.00	4%
2017	3,241,659,038,317.00	3,764,267,630,006.53	16%
2018	3,764,267,630,006.53	4,017,389,955,771.68	7%
2019	4,017,389,955,771.68	3,995,406,433,639.81	-0.55%
2020	3,995,406,433,639.81	3,840,501,662,318.66	-3.88%

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat untuk tahun 2016 sampai tahun 2017 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2018 tingkat pendapatan daerah mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2016 tingkat pendapatan daerah sebesar 4%, ditahun berikutnya pada 2017 pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi 16%, tetapi pada tahun 2018 pendapatan daerah mengalami penurunan menjadi sebesar 7%. Sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan pertumbuhan di kabupaten cianjur mendapatkan rasio -0.55% dan pada tahun 2020 mendapatkan rasio pertumbuhan sebesar -3.88%.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yang terjadi pada Kabupaten Cianjur untuk tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Cianjur.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RKKD} : \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{455,156,876,756.00}{3,241,659,038,317.00} \times 100\% \\ &= 14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{535,232,527,171.53}{3,764,267,630,006.53} \times 100\% \\ &= 14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{569,844,590,575.68}{4,017,389,955,771.68} \times 100\% \\ &= 14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{3,279,666,159,526.12}{3,995,406,433,639.81} \times 100\% \\ &= 16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{576,995,439,253.66}{3,840,501,662,318.66} \times 100\% \\ &= 15\% \end{aligned}$$

Tabel 4.8 Rasio kemandirian pemerintah Kabupaten cianjur

Tahun	PAD	Total pendapatan	Rasio kemandirian
2016	455,156,876,756.00	3,241,659,038,317.00	14%
2017	535,232,527,171.53	3,764,267,630,006.53	14%
2018	569,844,590,575.68	4,017,389,955,771.68	14%
2019	628,558,761,863.81	3,995,406,433,639.81	16%
2020	576,995,439,253.66	3,840,501,662,318.66	15%

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Dilihat dari tabel 4.8 untuk rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Cianjur, dimana tahun 2016-2018 rasio kemandirian sebesar 14%, sedangkan pada tahun 2019 rasio kemandiriannya sebesar 16% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 15%. dan termasuk kedalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif karena berada diantara 0%-25%.

Menurut Ibu Yane Diane (Narasumber BPKAD) berikut identifikasi faktor-faktor penghambat dan Kinerja Keuangan di Kabupaten Cianjur:

1. Sejauh ini pengelolaan Kinerja Keuangan Di Kabupaten Cianjur secara Desentralisasi sudah berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. Pendapatan Asli Daerah belum menjadi penopang dana yang utama bagi pembangunan di Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka dari itu Kabupaten Cianjur masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
3. Pengelolaan APBD sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Pembiayaan daerah sudah memberikan kontribusi terutama penyertaan modal terhadap PAD walaupun belum maksimal.
5. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi Keuangan
6. Salah satu penghambat keberhasilan Kinerja Keuangan di Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah SDM yang kurang kompeten dan Komposisi Anggaran.

4.3.2 Penerapan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Prima Herviani (Narasumber 1) dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur. Memaparkan penerapan *value for money* di Kabupaten Cianjur, sebagai berikut:

Pengadaan sumber daya dilihat dari kualitas tertinggi dengan harga terendah	semua bagian di pemerintah kabupaten cianjur selalu memilih sumber daya yang terbaik dengan harga yang kompetitif. Sebelum mengadakan sumber daya, bagian barang dan jasa akan melakukan survey di e-katalog yang sudah di sediakan oleh LKPP, lalu tinggal membandingkan produk sejenis yang memiliki harga yang kompetitif tapi dengan kualitas terbaik.
Pengalokasian sumber daya secara tepat	pengalokasian sumber daya sudah dilakukan dengan tepat dan sesuai tujuan. Karena alurnya bagian bagian itu sendiri yang mengajukan pengadaan sumber daya tersebut karena memang benar-benar dibutuhkan
Kualitas barang dan jasa	pemilihan sumber daya benar benar di perhatikan pengadaannya, agar sumber daya yang di beli sudah sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.
Pemeliharaan sumber daya dengan optimal	Pemerintah kabupaten cianjur juga pasti melindungi dan memelihara setiap asetnya, dan untuk saat ini pemerintah kabupaten cianjur mulai melakukan evaluasi pendataan ulang atas seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten cianjur agar tidak lagi terjadi tumpang tindih aset dengan OPD lain.
Menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang di miliki	beberapa OPD mampu menghasilkan output yang maksimal sesuai IKU yang ditetapkan bupati meskipun dengan anggaran yang pas-pasan

identifikasi dan evaluasi penghambatan keberhasilan organisasi	Pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi setiap triwulan, setiap OPD di Kabupaten Cianjur melaporkan target nya pada saat awal triwulan, lalu OPD menginput di aplikasi E-Sakip yang dikelola di bagian Kasubag Organisasi
Alternatif lain untuk melaksanakan tujuan	Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur selalu mempertimbangkan alternative lain jika dirasa memang ada, nanti pada saat setiap program diberi anggaran, nanti Bappeda akan membuat lagi efektivitas idealnya anggaran.
Pengukuran prospektif perencanaan kinerja	Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur juga pasti melakukan pengukuran prospektif dan perencanaannya selama 5 tahun kedepan, menurut Ibu Prima Herviani (Narasumber) pada saat bupati terpilih maka akan langsung membuat RPJMD.
Pengukuran retrospektif penilaian kinerja	pemerintah daerah juga melakukan pengukuran retrospektif dengan cara pada saat tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah menganalisis kembali apa saja yang tidak terserap dan tercapai di tahun lalu agar di evaluasi di tahun berjalan sehingga dapat tercapai sesuai target
Pertanggungjawaban efektivitas program	<u>Pertanggungjawaban atas kinerja kabupaten cianjur selalu di tuangkan dalam LAKIP dan LKPD dan sudah di transparansikan dengan cara di upload di website resmi Cianjur www.cianjur.go.id</u>

4.3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan menggunakan metode *Value For Money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisien, dan rasio efektif, dimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis yaitu tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melakukan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggarannya. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran ekonomis. Apabila hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup ekonomis, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang ekonomis. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak ekonomis.

Perhitungan tingkat ekonomis berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupagen cianjur tahun anggaran 2016-2020, dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{2,898,919,130,797.00}{3,157,735,114,967.75} \times 100\% \\ &= 92\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3,074,361,632,933.00}{3,307,389,462,129.42} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{3,364,476,600,631.00}{3,634,827,728,775.95} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{3,279,666,159,526.12}{3,628,474,340,995.08} \times 100\% \\ &= 90\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{3,206,600,721,623.74}{3,516,809,427,971.77} \times 100\% \\ &= 91\% \end{aligned}$$

Tabel 4.9 Rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio belanja daerah	Anggaran belanja daerah	Rasio ekonomis
2016	2,898,919,130,797.00	3,157,735,114,967.75	92%
2017	3,074,361,632,933.00	3,307,389,462,129.42	93%
2018	3,364,476,600,631.00	3,634,827,728,775.95	93%
2019	3,279,666,159,526.12	3,628,474,340,995.08	90%
2020	3,206,600,721,623.74	3,516,809,427,971.77	91%

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Dapat dilihat dari tabel 4.9 pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Cianjur mendapat Rasio Ekonomis sebesar 92% yang termasuk dalam kategori ekonomis, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Cianjur sama-sama mendapatkan Rasio Ekonomis sebesar 93% dan masih masuk pada kategori ekonomis. Sementara pada tahun 2019 rasio ekonomisnya adalah sebesar 90% dan pada tahun 2020 sebesar 91%.

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak efisien. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran kurang efisien. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup efisien, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran efisien. Apabila hasil dibawah 60%o anggaran dikatakan sangat efisien.

Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten cianjur tahun anggaran 2016-2020, dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{2,898,919,130,797.00}{3,241,659,038,317.00} \times 100\% \\ &= 89\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3,074,361,632,933.}{3,764,267,630,006.53} \times 100\% \\ &= 82\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{3,364,476,600,631.00}{4,017,389,955,771.68} \times 100\% \\ &= 84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{3,279,666,159,526.12}{3,628,474,340,995.08} \times 100\% \\ &= 82\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{3,206,600,721,623.74}{3,840,501,662,318.66} \times 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

Sumber: LKPD Pemerintah Kabupaten Cianjur (diolah peneliti)

Tabel 4.10 Rasio efisiensi pemerintah kabupaten cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio belanja daerah	Realisasi pendapatan	Rasio efisiensi
2016	2,898,919,130,797.00	3,241,659,038,317.00	89%
2017	3,074,361,632,933.00	3,764,267,630,006.53	82%
2018	3,364,476,600,631.00	4,017,389,955,771.68	84%
2019	3,279,666,159,526.12	3,995,406,433,639.81	82%
2020	3,206,600,721,623.74	3,840,501,662,318.66	83%

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Dapat dilihat dari tabel 4.10 Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun 2016 mendapatkan rasio efisiensi sebesar 89% yang termasuk kedalam kategori cukup efisien karena berada diantara 80% sampai dengan 90%, selanjutnya pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Cianjur mendapatkan rasio efisiensi sebesar 82% yang termasuk dalam kategori cukup efisien karena berada diantara 80% sampai dengan 90%, dan pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Cianjur mendapat rasio efisiensi sebesar 84%, 82% untuk tahun 2019 dan 83% untuk tahun 2020. masih termasuk kategori cukup efisien karena berada diantara 80% sampai dengan 90%.

Sedangkan, Pengukuran efisiensi dari segi input dan output sasaran:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Data input dan output dalam perhitungan ini diperoleh dari data pencapaian realisasi anggaran yang terdapat di LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur. Nilai input didapat dari persentase anggaran yang digunakan untuk menghasilkan output, sedangkan nilai output didapat dari persentase pencapaian fisik pada setiap kegiatan

Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen efisiensi, maka disajikan deaskripsi data dari sasaran yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Cianjur periode tahun 2016-2020.

Tabel 4.11 Pengukuran Efisiensi Pada Sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur 2016

NO	SASARAN	2016		EFISIENSI 2016 %
		INPUT	OUTPUT	
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	94.51	134.33	142%
2	Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan	97.65	100	102%
3	Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang	98.10	100	102%

4	Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan	96.29	100	104%
5	Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik	99.42	100	101%
6	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	0.00	0	0%
7	Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal	100.00	20	20%
8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan	98.05	100	102%
9	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan	97.32	221.04	227%
10	Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya , serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat	95.69	107.23	112%
11	Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan	90.76	99.26	109%
12	Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat	94.58	90.41	96%
13	Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin	88.49	102.49	116%
14	Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat	93.77	100	107%
15	Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas	98.91	106.27	107%
16	Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)	100.00	106.41	106%
17	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	91.09	59.82	66%
18	Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak	84.18	100	119%
19	Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing	87.83	102.97	117%
20	Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan	99.03	105	106%
21	Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan	96.84	172.63	178%

22	Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar	76.92	106.93	139%
23	Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna	97.34	67.89	70%
24	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	92.17	75.53	82%
25	Terwujudnya iklim investasi yang sehat	94.41	430	455%
26	Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan	79.74	57.22	72%
27	Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur	99.25	36.67	37%
28	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	98.41	232.42	236%
29	Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal	94.69	297.46	314%
30	Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup	96.09	62.09	65%
31	Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berkhlah mulia	95.63	68.57	72%
32	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal	92.20	102.14	111%
33	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	92.38	117.64	127%

34	Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kemananan yang kondusif	99.98	82	82%
35	terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi	94.78	86.82	92%
36	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	99.71	100	100%
37	Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah	98.26	46.47	47%
38	pelebagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	77.62	100	129%
39	terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial	90.66	109.37	121%
	JUMLAH	91.61	110.4	83%

Sumber: LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur (diolah peneliti)

Tabel 4.12 Pengukuran Efisiensi Pada Sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur 2017

NO	SASARAN	2017		EFISIENSI 2017 %
		INPUT	OUTPUT	
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah	87.32	101.25	116%
2	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	95.31	156.57	164%
3	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai- nilai akhlak mulia	98,42	125.45	127%
4	Menurunnya PMKS	99,97	100.68	101%
5	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	46.66	94.10	202%
6	Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	91.64	99.99	109%
7	Menguatnya ekonomi daerah	94.32	88.53	94%

8	Berkurangnya kemiskinan	100.00	98.37	98%
9	Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata	92.24	111.35	121%
10	Mantapnya ketahanan pangan masyarakat	96.23	99.57	103%
11	Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel	96.93	113.39	117%
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	95,58	100.00	105%
	JUMLAH	88.96	107.44	83%

Sumber: LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur (diolah peneliti)

Tabel 4.13 Pengukuran Efisiensi Pada Sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur 2018

NO	SASARAN	2018		EFISIENSI 2018 %
		INPUT	OUTPUT	
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah	93.73	100.14	107%
2	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	88.85	100.00	113%
3	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia	98.79	104.12	105%
4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	96.78	94.57	98%
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	90.62	100.10	110%
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	94.32	123.94	131%
7	Meningkatnya ekonomi sector agribisnis dan pariwisata	95.51	121.87	128%
8	Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan	97.10	104.25	107%
9	Mantapnya ketahanan pangan masyarakat	97.69	104.17	107%
10	Menurunnya angka kemiskinan	99.77	96.35	97%
11	Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel	70.97	103.71	146%
12	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	93.21	104.93	113%
	JUMLAH	93.11	104.85	89%

Sumber: LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur (diolah peneliti)

Tabel 4.144 Pengukuran Efisiensi Pada Sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur 2019

NO	SASARAN	2019		EFISIENSI 2019
		INPUT	OUTPUT	%
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah	88.54	103	117%
2	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	89.97	144.41	161%
3	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia	99.19	95.8	97%
4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	92.28	96.96	105%
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	91.16	100.34	110%
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	93.26	101.15	108%
7	Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata	96.35	128.97	134%

8	Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan	93.88	103.75	111%
9	Mantapnya ketahanan pangan masyarakat	99.72	105.21	106%
10	Menurunnya angka kemiskinan	97.57	101	103%
11	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	89.72	96.64	108%
12	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	86.83	120.51	139%
		93.21	108	116%

Tabel 4.155 Pengukuran Efisiensi Pada Sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur 2020

NO	SASARAN	2020		EFISIENSI 2020
		INPUT	OUTPUT	%

1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah	93.1	100.66	108%
2	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	98.42	110.86	113%
3	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia	99.81	136.9	137%
4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	90.99	96.69	106%
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	88.87	100.56	113%
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	97.34	92.13	95%
7	Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata	98.24	129.72	132%
8	Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan	97.49	97.95	100%
9	Mantapnya ketahanan pangan masyarakat	99.88	99.17	99%
10	Menurunnya angka kemiskinan	99.23	91.72	92%
11	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	85.85	91.57	107%

12	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	94.53	97.87	104%
		95.31	103.82	109%

3. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas dinilai efektif apabila suatu organisasi, program atau kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat efektif. Apabila hasil antara 90-100% maka anggaran efektif. Jika hasil antara 80-90% maka anggaran dikatakan cukup efektif, dan hasil antara 60-80% dapat dikatakan anggaran kurang efektif. Apabila dibawah 60% anggaran dikatakan tidak efektif.

Perhitungan tingkat efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran Pendapatan}}{\text{target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{3,241,659,038,317.00}{3,401,960,089,236.73} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3,764,267,630,006.53}{3,803,680,476,293.55} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{4,017,389,955,771.68}{4,085,021,388,832.55} \times 100\% \\ &= 98\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{3,995,406,433,639.81}{4,090,606,786,847.00} \times 100\% \\ &= 98\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{3,840,501,662,318.66}{3,967,366,428,102.00} \times 100\% \end{aligned}$$

= 97%

Sumber: LKPD Pemerintah Kabupaten Cianjur (diolah peneliti)

Tabel 4.16 Rasio efektivitas pemerintah kabupaten cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi pendapatan	Anggaran pendapatan	Rasio efektivitas
2016	3,241,659,038,317.00	3,401,960,089,236.73	95%
2017	3,764,267,630,006.53	3,803,680,476,293.55	99%
2018	4,017,389,955,771.68	4,085,021,388,832.55	98%
2019	3,995,406,433,639.81	4,090,606,786,847.00	98%
2020	3,840,501,662,318.66	3,967,366,428,102.00	97%

Sumber: LKPD data diolah peneliti, 2021

Dilihat dari tabel 4.14 untuk tahun 2016 rasio efektivitas sebesar 95% yang termasuk kategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%, selanjutnya pada tahun 2017 rasio efektivitas meningkat menjadi sebesar 99% dan masuk kategori efektif karena masih berada diantara 90% sampai 100% dan pada tahun 2018 dan 2019 rasio efektivitasnya sebesar 98% dan tahun 2020 rasio efektivitasnya sebesar 97% dan masih berada dikategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%.

4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan untuk tahun 2016-2018 mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur, selain itu juga besarnya dana sumbangan yang diberikan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur.

Hal ini tidak baik bagi kinerja pemerintah daerah, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tidak mampu dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai belanja-belanja daerah, sehingga dikhawatirkan pemerintah daerah mengalami defisit atau kerugian.

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rasio kinerja keuangan daerah yang mengalami penurunan maupun yang mengalami peningkatan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk tahun 2016-2017 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2018 rasio efektivitas mengalami penurunan. Walaupun rasio efektivitas mengalami peningkatan, tetapi rasio efektivitas untuk tahun 2016-2020 masih termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%.

Penurunan rasio efektivitas terjadi disebabkan karena pendapatan masih dibawah yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2. Untuk tingkat efisiensi Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun 2016-2020 mendapatkan rasio efisien, dan merupakan hal yang baik bagi pemerintah kabupaten cianjur.

Dengan stabilnya rasio efisiensi atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur mampu meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan.

3. Untuk rasio keserasian yang diukur dari rasio belanja operasi dan belanja modal untuk tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Untuk pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk tahun 2016 sampai tahun 2019 masih dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pembelanjaan operasi dan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut. Sementara untuk tahun 2020 serapan belanja modalnya hanya terserap sebesar 12% hal ini dikarenakan alokasi belanjanya di alokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.
4. Untuk tingkat rasio pertumbuhan pendapatan yang diukur untuk tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 16%, tetapi pada tahun 2018 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan kembali menjadi 7% hal ini dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tetapi pada tahun 2019 pertumbuhannya tumbuh kearah yang negatif yaitu menjadi sebesar -0.55% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar -3.88%, hal ini terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga seluruh sektor mengalami penurunan.
5. Untuk tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk tahun 2016 sampai tahun 2018 berada di angka yang stabil sebesar 14%, tahun 2019 naik menjadi 16% dan tahun 2020 menjadi 15%. Kemandirian ini termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Dimana maksud pola instruktif adalah pola hubungan dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. Didapatkannya pola hubungan instruktif terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yang artinya Pemerintah Kabupaten Cianjur belum mampu dalam menggunakan dari pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Cianjur masih bergantung dengan dana dari Pemerintah Pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih bergantung bantuan dari

Pemerintah Pusat. Jadi kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat dikatakan masih rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga menjadi salah satu yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Cianjur sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

4.4.2 Penerapan Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020

1. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Prima Herviani (Narasumber) mengatakan bahwa penerapan *Value For Money* di Kabupaten Cianjur sudah dilakukan dengan maksimal meskipun hasilnya belum optimal, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

A. Ekonomis

- a.) Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui bagian-bagiannya selalu memilih terlebih dahulu jika akan mengadakan sumber daya barang dan jasa, yaitu dengan cara memilih produk yang terbaik dengan harga yang kompetitif dengan kualitas yang baik. Ibu Prima Herviani (Narasumber) juga menjelaskan jika saat akan membeli barang atau jasa sekarang sudah beralih ke digital melalui *e-katalog* yang sudah disediakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), jadi setiap daerah hanya bisa membeli barang sesuai spesifikasi yang sudah disediakan di *e-katalog* LKPP. Jika ditemukan pengadaan barang dan jasa berbeda harga dengan *e-katalog* maka hal tersebut akan menjadi temuan karena dalam *e-katalog* sudah ada harga resmi yang tidak bisa ditambah dan dikurangi sendiri oleh tiap daerah. Sehingga setiap daerah harus pintar-pintar mencari spesifikasi yang terbaik dengan harga yang kompetitif.
- b.) Ibu Prima Herviani (Narasumber) juga mengatakan jika pengalokasian sumber daya dilakukan secara tepat dan sesuai tujuan. Karena alurnya bagian-bagian itu sendiri yang mengajukan pengadaan bukan tiba-tiba di alokasikan. Alurnya adalah setiap bagian meminta ke Bagian Barang dan Jasa, jadi tidak mungkin Bagian Barang dan Jasa memberi barang yang tidak diminta. Sehingga sudah pasti jika sumber daya tersebut ada, berarti sumber daya tersebut sudah pasti digunakan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian.

- c.) Ibu Prima Herviani (Narasumber) juga mengatakan pemilihan sumber daya sudah dilakukan dengan melakukan screening terhadap sumber daya yang ada guna menemukan spesifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hal ini agar sumber daya tersebut benar-benar bisa di pergunakan sesuai dengan kebutuhan.

Hal itu sejalan dengan pemerolehan rasio ekonomis di Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2018 yang mendapatkan kategori ekonomis.

Tabel 4.17 Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio belanja daerah	Anggaran belanja daerah	Rasio ekonomis
2016	2,898,919,130,797.00	3,157,735,114,967.75	92%
2017	3,074,361,632,933.00	3,307,389,462,129.42	93%
2018	3,364,476,600,631.00	3,634,827,728,775.95	93%
2019	3,279,666,159,526.12	3,628,474,340,995.08	90%
2020	3,206,600,721,623.74	3,516,809,427,971.77	91%

B. Efisiensi

Menurut Ibu Prima Herviani (Narasumber) tingkat efisiensi di kabupaten cianjur sudah dinilai cukup baik, meskipun banyak yang harus di evaluasi, sebagaimana di uraikan sebagai berikut:

- a.) Pemerintah kabupaten cianjur juga pasti melindungi dan memelihara setiap asetnya, dan untuk saat ini pemerintah kabupaten cianjur mulai melakukan evaluasi pendataan ulang atas seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten cianjur agar tidak lagi terjadi tumpang tindih aset dengan OPD lain. Ibu Prima Herviani (Narasumber) juga menegaskan jika setiap bagian yang memegang aset harus turut menjaga dan memeliharanya. Penghapusan aset pun dilakukan jika aset tersebut sudah benar-benar mati dan tidak bisa diperbaiki lagi,. Sehingga pemeliharaan agar aset tersebut bisa tetap bisa digunakan yaitu dengan cara service rutin.
- b.) Ibu Prima Herviani (Narasumber) mengemukakan beberapa OPD mampu menghasilkan output yang maksimal sesuai IKU yang ditetapkan bupati meskipun dengan anggaran yang pas-pasan. Meskipun begitu Ibu Prima Herviani (Narasumber) pun memberi tahu jika masih saja ada beberapa output yang sudah jadi tapi belum digunakan dan belum difungsikan dengan optimal.

Maka dari itu hasil rasio efisiensi yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun 2016 sampai tahun 2018 berada dalam kategori cukup baik.

Tabel 4.18 Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio belanja daerah	Realisasi pendapatan	Rasio efisiensi
-------	----------------------	----------------------	-----------------

2016	2,898,919,130,797.00	3,241,659,038,317.00	89%
2017	3,074,361,632,933.00	3,764,267,630,006.53	82%
2018	3,364,476,600,631.00	4,017,389,955,771.68	84%
2019	3,279,666,159,526.12	3,995,406,433,639.81	82%
2020	3,206,600,721,623.74	3,840,501,662,318.66	83%

C. Efektivitas

Menurut Ibu Prima Herviani (Narasumber) tingkat efektivitas di kabupaten cianjur sudah dinilai baik dan masih harus terus di tingkatkan, sebagaimana di uraikan sebagai berikut:

- a.) Pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi setiap triwulan, setiap OPD di Kabupaten Cianjur melaporkan target nya pada saat awal triwulan, lalu OPD menginput di aplikasi E-Sakip yang dikelola di bagian Kasubag Organisasi, nanti setiap akhir triwulan pada OPD melaporkan realisasi dari target yang sudah diisi apakah tercapai kinerjanya ke penyerapan anggarannya itu berapa %, nanti dilaporkan tiap triwulan di aplikasi E-Sakip. Setelah semua mengumpulkan nanti Kasubag bagian Organisasi merekap dan melaporkan kepada bupati dan kepala sekda, lalu di klasifikasikan mana saja OPD yang sudah menginput, mana yang belum, mana saja yang kinerjanya tercapai, dan penyerapannya bagus, setelah itu di rangking di bagian organisasi. Setelah pengklasifikasian, selanjutnya di rekap per satu tahun anggaran. Lapornya dituangkan dalam lakip, dan nanti alasan-alasan tidak tercapainya dituangkan dalam lakip.
- b.) Ibu Prima Herviani (Narasumber) mengatakan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur selalu mempertimbangkan alternative lain jika dirasa memang ada, nanti pada saat setiap program diberi anggaran, nanti Bappeda akan membuat lagi efektivitas idealnya anggaran. Jika PAGU APBD dari BPKAD sudah keluar, mau tidak mau anggaran tersebut harus cukup, dan kegiatan harus tetap berjalan dengan anggaran yang ada.
- c.) Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur juga pasti melakukan pengukuran prospektif dan perencanaannya selama 5 tahun kedepan, menurut Ibu Prima Herviani (Narasumber) pada saat bupati terpilih maka aka langsung membuat RPJMD.
- d.) selain pengukuran prospektif, pemerintah daerah juga melakukan pengukuran retrospektif dengan cara pada saat tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah menganalisis kembali apa saja yang tidak terserap dan tercapai di tahun lalu agar di evaluasi di tahun berjalan sehingga dapat tercapai sesuai target.
- e.) Pertanggungjawaban atas kinerja kabupaten cianjur selalu di tuangkan dalam LAKIP dan LKPD dan sudah di transparansikan dengan cara di upload di website resmi Cianjur www.cianjur.go.id

Maka dari itu hasil rasio efektivitas yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun 2016 sampai tahun 2018 berada dalam kategori efektif.

Tabel 4.19 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi pendapatan	Anggaran pendapatan	Rasio efektivitas
2016	3,241,659,038,317.00	3,401,960,089,236.73	95%
2017	3,764,267,630,006.53	3,803,680,476,293.55	99%
2018	4,017,389,955,771.68	4,085,021,388,832.55	98%
2019	3,995,406,433,639.81	4,090,606,786,847.00	98%
2020	3,840,501,662,318.66	3,967,366,428,102.00	97%

4.4.3 Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Valur For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020

1. Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis yaitu tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melakukan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran dan presentase tingkat pencapaiannya. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat ekonomis. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran ekonomis. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup ekonomis, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang ekonomis. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak ekonomis.

Berikut analisis kinerja keuangan dengan menggunakan konsep value for money pada pemerintah kabupaten cianjur tahun 2016-2020 dari segi Ekonomis:

a. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp. 2,898,919,130,797.00}}{\text{Rp. 3,157,735,114,967.75}} \times 100\% \\ &= 92\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah 92% yang artinya ekonomis dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja.

Hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2016 menunjukkan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja di targetkan sebesar Rp. 3,157,735,114,967.75 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 2,898,919,130,797.00.

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,478,224,438,537.02. unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,575,125,367,827.73. dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,282,140,271,976.00. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,435,685,544,112.00.

b. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3,074,361,632,933.00}{3,307,389,462,129.42} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah 93% yang artinya ekonomis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja di targetkan sebesar Rp. 3,307,389,462,129.42 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 3,074,361,632,933.00.

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,385,576,934,690.35. unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,514,984,397,548.77. dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,249,814,919,299.00. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,441,861,223,615.00.

c. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{3,364,476,600,631.00}{3,634,827,728,775.95} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah 93% yang artinya ekonomis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja di targetkan sebesar Rp. 3,634,827,728,775.95 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 3,364,476,600,631.00

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2018 sebesar Rp. 2,585,756,149,588.97. unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,506,457,019,275.53. dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2018 sebesar Rp. 2,434,088,944,453.00. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,419,095,074,587.00.

d. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{3,279,666,159,526.12}{3,628,474,340,995.08} \times 100\% \\ &= 90\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah 90% yang artinya ekonomis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja di targetkan sebesar Rp. 3,628,474,340,995.08 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 3,279,666,159,526.12

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,795,033,055,599.81. unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,632,585,549,943.73. dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,584,281,087,455.12. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,484,897,593,811.00.

e. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{3,206,600,721,623.74}{3,516,809,427,971.77} \times 100\% \\ &= 91\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 rasio ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah 91% yang artinya ekonomis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik yaitu anggaran belanja di targetkan sebesar Rp. 3,628,474,340,995.08 yang mana terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 3,279,666,159,526.12

Dari unsur anggaran belanja tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,795,033,055,599.81. unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,632,585,549,943.73. dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,584,281,087,455.12. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,484,897,593,811.00.

Tabel 4.20 Pengukuran Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio ekonomis	Kriteria
2016	93%	Ekonomis
2017	93%	Ekonomis
2018	93%	Ekonomis
2019	90%	Ekonomis
2020	91%	Ekonomis

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.21, pengukuran kinerja menggunakan tingkat ekonomis menunjukkan bahwa penganggaran di Pemerintah Kabupaten Cianjur dikatakan ekonomis karena dari tahun 2016 sampai tahun 2018 tingkat ekonomis berkisar antara 90% sampai 100%. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah dinilai semakin baik.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis. Ekonomis terkait dengan sejauh mana meminimalisir input primer yang berupa anggaran atau kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi. Dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak efisien. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran kurang efisien. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup efisien, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran efisien. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan sangat efisien.

Berikut analisis kinerja keuangan dengan menggunakan konsep value for money pada Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2018 dari segi Efisiensi:

a. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{2,898,919,130,797.00}{3,241,659,038,317.00} \times 100\% \\ &= 89\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah 89% yang artinya cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti Kinerja Pemerintah tahun 2016 menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 2,898,919,130,797.0082 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 3,241,659,038,317.00 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,345,029,175,961.00, dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,282,140,271,976.00. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,435,685,544,112.00.

b. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3,074,361,632,933.00}{3,764,267,630,006.53} \times 100\% \\ &= 82\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalami penurunan dibandingkan 2016 yaitu sebesar 82% yang artinya cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2017 menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 3,074,361,632,933.00 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 3,764,267,630,006.53 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2017 sebesar Rp. 2,404,896,314,491.00, dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,249,814,919,299.00. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,441,861,223,615.00.

c. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{3,364,476,600,631.00}{4,017,389,955,771.68} \cdot 100\% \\ &= 84\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 84% yang artinya cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2018 menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 3,364,476,600,631.00 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 4,017,389,955,771.68 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2018 sebesar Rp. 4,017,389,955,771.68, dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2018 sebesar Rp. 2,434,088,944,453.00. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,419,095,074,587.00.

d. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{3,279,666,159,526.12}{3,628,474,340,995.08} \cdot 100\% \\ &= 82\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalami penurunan yaitu sebesar 82% yang artinya cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2019 menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 3,279,666,159,526.12 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 3,995,406,433,639.81 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,658,511,928,176.00, dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,584,281,087,455.12. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,484,897,593,811.00.

e. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{3,206,600,721,623.74}{3,840,501,662,318.66} \cdot 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan yaitu sebesar 83% yang artinya cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 3,206,600,721,623.74 yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima sebesar Rp. 3,840,501,662,318.66 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,962,630,693,065.00, dan dari unsur realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,709,525,819,584.74. untuk belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 1,491,484,414,346.00

Tabel 4.21 Pengukuran Tingkat Efisiensi Pemerintah Kabupaten Cianjur

Tahun	Rasio efisiensi	Kriteria
2016	89%	Cukup efisien
2017	82%	Cukup efisien
2018	84%	Cukup efisien
2019	82%	Cukup efisien
2020	83%	Cukup efisien

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.22, perhitungan kinerja keuangan menggunakan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Cianjur menyelenggarakan program dengan tingkat tergolong cukup efisien.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah mampu meminimalisir terjadi pemborosan-pemborosan di semua sektor, meskipun masih banyak yang harus di evaluasi agar tingkat efisiensi di Kabupaten Cianjur lebih meningkat. Salah satu penyebab tingkat ke efisien nya berada di kategori cukup adalah seperti sudah tersedianya fasilitas yang sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan, ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja barang yang setiap tahun terus mengalami kenaikan, kemudian penyebab tingkat efisien masih dalam kategori cukup karena besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai, seperti perjalanan dinas/kegiatan rapat di luar kantor dan pengadaan kendaraan dinas baru di instansi pemerintahan.

Selain itu, berdasarkan hasil analisis efisiensi pada 32 Sasaran Kinerja Kabupaten Cianjur Tahun 2016 dapat dikatakan cukup efisien karena berada dikisaran 80%-90%. Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meminimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini anggaran yang digunakan sebesar 91,61% dari total anggaran, dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan yaitu 110%. Karena dapat meminimalkan penggunaan input dan memaksimalkan output dengan hasil efisiensi 83% maka artinya kegiatan sasaran kinerja di Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaannya sudah cukup efisien.

Pada tahun 2017 analisis efisiensi dari 12 Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat dikatakan cukup efisien karena berada dikisaran 80%-90%. Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meminimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini anggaran yang digunakan sebesar 88.96% dari total anggaran, dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan yaitu 107.44%. Karena dapat meminimalkan penggunaan input dan memaksimalkan output dengan hasil efisiensi 83% maka artinya kegiatan sasaran kinerja di Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaannya sudah cukup efisien.

Sedangkan pada tahun 2018, berdasarkan analisis efisiensi dari 12 Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 dapat dikatakan cukup efisien karena berada dikisaran 80%-90%. Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meminimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini anggaran yang digunakan sebesar 93,11% dari total anggaran, dengan keluaran (*output*) yang

dihasilkan yaitu 104.85%. Karena dapat meminimalkan penggunaan input dan memaksimalkan output dengan hasil efisiensi 89% maka artinya kegiatan sasaran kinerja di Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaannya sudah cukup efisien.

Melalui analisis rasio efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Cianjur. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dapat dikatakan untuk tahun 2016-2018 Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah cukup mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan mengefisienkan pengeluaran untuk mencapai target yang dicapai. Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pengukuran efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat efektif. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran efektif. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup efektif, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang efektif. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak efektif.

Berikut analisis kinerja keuangan dengan menggunakan konsep value for money pada pemerintah kabupaten cianjur tahun 2016-2018 dari segi Efektivitas:

a. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{3,241,659,038,317.00}{3,401,960,089,236.73} \times 100\% \\ &= 95\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di pemerintah kabupaten cianjur yaitu sebesar 95% yang artinya efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2016 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 3,241,659,038,317.00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

lebih besar daripada target anggaran pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 3,401,960,089,236.73 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,345,029,175,961.00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,155,469,458,260.00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,486,381,721,149.50. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,286,686,635,000.00.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang diterima.

b. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3,764,267,630,006.53}{3,803,680,476,293.55} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di pemerintah kabupaten cianjur mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 99% yang artinya efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 3,764,267,630,006.53 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih besar daripada target anggaran pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 3,803,680,476,293.55 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2017 sebesar Rp. 2,404,896,314,491.00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,201,273,702,768.00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2017 sebesar Rp. 2,417,860,235,389.00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,213,788,681,000.00

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang diterima.

c. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{4,017,389,955,771.68}{4,085,021,388,832.55} \times 100\% \\ &= 98\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 98% tetapi masih masuk kategori efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 4,017,389,955,771.68 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih besar daripada target anggaran pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 4,085,021,388,832.55 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2018 sebesar Rp. 2,465,582,412,300.00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,246,193,466,963.00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2017 sebesar Rp. 2,484,779,737,341.60. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,273,639,753,871.60.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang diterima.

d. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{3,995,406,433,639.81}{4,090,606,786,847.00} \times 100\% \\ &= 98\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 98% masih masuk kategori efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 3,995,406,433,639.81 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih rendah daripada target anggaran pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 4,090,606,786,847.00 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,658,511,928,176.00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,261,839,365,877.00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,732,937,101,414.00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,311,223,852,362.00.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang diterima.

e. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{3,840,501,662,318.66}{3,967,366,428,102.00} \times 100\% \\ &= 97\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu sebesar 97% masih masuk kategori efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

Hal ini berarti kinerja pemerintah tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik, yaitu realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 3,840,501,662,318.66 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih rendah daripada target anggaran pendapatan yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 3,967,366,428,102.00 yang mana terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,962,630,693,065.00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,090,614,730,593.00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2020 sebesar Rp. 3,058,869,515,705.00. Unsur pendapatan

transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 2,140,709,014,995.00.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil daripada target anggaran belanja yang diterima.

Tabel 4.22 Pengukuran tingkat efektivitas pemerintah kabupaten cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio efektivitas	Kriteria
2016	95%	Efektif
2017	99%	Efektif
2018	98%	Efektif
2019	98%	Efektif
2020	97%	Efektif

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.23, perhitungan kinerja keuangan menggunakan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa penganggaran pada pemerintah kabupaten cianjur pada tahun 2016-2018 dikategorikan efektif karena realisasi anggaran yang sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil program dengan target yang ditetapkan tercapai. Ini dapat dilihat dari terlaksananya program yang ditargetkan pemerintah yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, seni budaya, olahraga dan pemuda, peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. penataan kawasan tepian sungai, pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta manajemen transportasi, Peningkatan dan pengembangan pelayanan air bersih, pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pariwisata.

Berikut adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

Tabel 4.23 Pengukuran tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas Pemerintah kabupaten cianjur Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio ekonomis	93%	93%	93%	90%	91%
Kriteria	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
Tingkat efisiensi	89%	82%	84%	82%	83%

Kriteria	Cukup efisien	Cukup efisien	Cukup efisien	Cukup efisien	Cukup efisien
Tingkat efektivitas	95%	99%	98%	98%	97%
Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Akuntansi sektor publik dapat berperan untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas atau yang dikenal dengan *Value For Money*. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang menekankan pentingnya penghargaan atas setiap rupiah uang publik dengan cara memanfaatkannya secara ekonomis, efisien dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomis selama tahun 2016 sampai dengan 2020 berada pada kriteria ekonomis. Kriteria ekonomis menunjukkan kinerja yang baik di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Konsep ekonomis terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input dan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional organisasi.

Hasil pengukuran kinerja yang diukur dari tingkat efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah cukup efisien dalam mengelola anggaran. Ini ditunjukkan dari hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran berkisar diantara 80% sampai 90%. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dengan output. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input yang serendah-rendahnya.

Pengukuran kinerja yang diukur berdasarkan tingkat efektivitas pada tahun 2016 sampai tahun 2020 masuk kedalam kriteria efektif karena berada diantara 90% sampai 100%. Hasil tersebut menunjukkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan sudah berjalan baik.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Value For Money* didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomi selama tahun 2016 sampai tahun 2020 berada pada kriteria ekonomis.

Pengukuran kinerja keuangan yang diukur dari tingkat efisiensi menunjukkan kriteria cukup efisien. Ini ditunjukkan dari perhitungan tingkat efisiensi anggaran berkisar diantara 80% sampai 90%. Pada tingkat efektivitas telah memenuhi kriteria efektif karena realiasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Cianjur diketahui bahwa:
 - a. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020 yang ditinjau dari rasio efektivitas berada pada kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah kabupaten cianjur tidak mampu mencapai target untuk meningkatkan pendapatan di daerah tersebut.
 - b. Jika ditinjau dari segi rasio efisiensi, kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Cianjur berada di kisaran 80%-90% dan masuk kedalam kategori efisien, hal ini karena besaran belanja daerah yang dikeluarkan berada dibawah Realisasi Pendapatannya.
 - c. Untuk keserasian yang di hitung dengan belanja operasi dan belanja modal dinilai sudah cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah cukup mampu untuk menjalankan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunannya.
 - d. Untuk tingkat rasio pertumbuhan pendapatan dinilai mengalami kenaikan dan penurunan yang berfluktuatif, pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan berada pada rasio 4% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 16%, tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 yaitu sebesar 7%, sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -0.55% dan pada tahun 2020 penurunan nya kembali lebih dalam yaitu sebesar -3.88% Penurunan ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Cianjur disebabkan pandemi Covid-19.
 - e. Untuk tingkat kemandirian keuangannya masih berada dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0%-25% dan masuk kategori hubungan instruktif, hal ini terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya

sendiri, sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah masih bergantung dengan dana dari Pemerintah Pusat.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *value for money* di Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2020 diketahui bahwa:
 - a. Penerapan *value for money* di Kabupaten Cianjur ditinjau dari segi ekonomis sudah merujuk pada tingkat ekonomis, akan tetapi untuk pemilihan sumber daya yang bernilai ekonomis, tidak perlu dilakukan survey harga untuk mengetahui perbandingan harga karena segala pengadaan sumber daya di Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah terintegrasi melalui *e-katalog* yang sudah di siapkan LKPP sehingga pengadaan input hanya melalui *e-katalog*.
 - b. Dilihat dari segi efisiensi, penggunaan anggaran belanja pemakaiannya selalu di minimalkan dengan target agar semua OPD yang ada di Kabupaten Cianjur bisa mendapatkan hasil belanja yang maksimal dengan anggaran yang di minimalkan, sedangkan untuk hasil *output* nya beberapa OPD mampu menghasilkan *output* yang maksimal dengan sumber daya yang dimilikinya.
 - c. Untuk penerapan *value for money* dari segi efektivitas, tingkat tercapainya target masih mengalami kenaikan dan penurunan dari setiap OPD, setiap tahun triwulan dalam 1 tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Cianjur selalu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap OPD yang belum mencapai target.
3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Tingkat ekonomis kinerja keuangan pemerintah kabupaten cianjur berada pada rasio 90%-100% dan masuk kategori ekonomis. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah sudah digunakan seminimal mungkin dan sudah merealisasikan anggaran tersebut untuk program/kegiatan yang sudah di tetapkan.
 - b. Tingkat efisiensi untuk realisasi anggaran terhadap output dari tahun 2016-2020 dinilai sudah cukup efisien dikarenakan hasil rasionya berada diantara 80% sampai 90%. Ini menunjukkan jika pengelolaan anggaran belanja sudah cukup memenuhi syarat efisien yaitu penggunaan yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum.
 - c. Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2016 sampai 2020 dikategorikan efektif karena tingkat rasio efektivitasnya berada diantara 90% sampai 100%. Ini menunjukkan bahwa program/sasaran kegiatan sudah terealisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis kesimpulan dari penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan konsep *value for money* pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2020, maka penulis memberikan saran dalam upaya pembenahan dalam pengelolaan Kinerja Keuangan di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

1. Saran Praktis

- a. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus lebih mengoptimalkan lagi sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap dana ekstern dapat diminimalisir.
- b. Dilihat dari tingkat ekonomis Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan lebih meningkatkan lagi dalam melakukan penghematan anggaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan dalam mencapai program/kegiatan yang ingin dicapai.
- c. Dilihat dari tingkat efisiensi, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus lebih memperhatikan perencanaan dan pengendalian realisasi anggaran belanja dibandingkan realisasi anggaran pendapatan, karena secara keseluruhan rasio efisiensinya masih berada di kategori cukup efisien.
- d. Dilihat dari tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk tahun tahun selanjutnya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Saran Akademis

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat pada penelitian ini, seperti sebagai berikut:

- a. Apabila ada peneliti lain yang tertarik mengadakan penelitian yang hampir sama, sebaiknya dalam pengukuran menggunakan *value for money* untuk penentuan *outcome* dapat menggunakan metode lain, misalnya menyebar angket kepada masyarakat agar diketahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu organisasi, sehingga nilai *outcome* lebih riil.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur kinerja suatu organisasi tidak hanya menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi perlu ditambah dengan dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*)
- c. Dikarenakan penelitiannya ini hanya dilakukan di dalam satu kota sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kota lain, sehingga untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di beberapa kota lain yang ada di Indonesia untuk dijadikan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, M. (2017). Terbentur Anggaran yang Kurang, Ini Solusi Pemkab Cianjur Perbaiki Jalan Rusak. *AYOBANDUNG.COM*. Tersedia di: <https://ayobandung.com/read/2017/12/14/26501/terbentur-anggaran-yang-kurang-ini-solusi-pemkab-cianjur-perbaiki-jalan-rusak> [Diakses 06 Juni 2020]
- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Abdul Halim. dan Syam, kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta
- Adlyana. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berbasis Value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Universitas Sumatera Utara*. [online]. Tersedia di: <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/59931>. [Diakses pada 09 November 2020]
- Amalia. (2015). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. [online] Volume 11(1). Tersedia di: <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/20> [Diakses pada 09 November 2020]
- Bayu. dan Sam. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *Accountia Journal*. [online] Volume.4, No.1, pp. 1 – 10. Tersedia di: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia/article/view/459> [Diakses pada 11 Januari 2021]
- Enre. (2020). *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*. skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ilmiyono. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Faktor Ekonomi Makro Dalam Memprediksi Volatilitas Harga Saham Perusahaan Subsektor Industri Food

- And Beverages. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*. [online]. Volume 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 35-48. Tersedia di: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/432> [Diakses pada 20 Februari 2021]
- Indrayani. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. [online] Volume 6(1). Tersedia di: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/article/view/1820> [Diakses pada 09 November 2020]
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*. [online] Volume 3(1). Tersedia di: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/view/10496> [Diakses pada 09 November 2020]
- Kristanti, O. I. (2016). *Analisis kinerja keuangan melalui pendekatan value for money (studi kasus di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karimunjawa)*. skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Kurniawati, N. (2016). Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintahan Kota Bantul. *Jurnal Akuntansi Manajemen*. [online] Volume 3(1). Tersedia di: <https://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/1227/885> [Diakses pada 10 November 2020]
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFEE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Naim. (2013). *Penerapan Konsep Value for Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Kota Makassar*. skripsi. Universitas Hasanudin.
- Pancanugraha. (2015). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso Tahun 2013-2014.

Jurnal Katalogis. [online] Volume 5 Nomor 6. Tersedia di: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9601>. [Diakses pada 10 November 2020]

Polii. et al (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. [online] Vol.8 No.4 Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072> [Diakses pada 10 November 2020]

Purwiyanti. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *E-Jurnal Katalogis*. [online] Volume 5(3). Tersedia di: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/8696> [Diakses pada 06 Juni 2020]

Ratmono. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*. UPP STIM YKPN Yogyakarta

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.

_____ (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____ (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

_____ (2000). *Peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 4 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

_____ (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah*.

_____ (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

_____. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Pasal 3 ayat (4) Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

_____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah*

_____. 2000. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*

_____. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

_____. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

_____. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*

_____. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.*

_____. 2006. *Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*

Ridwan. dan Anggarawati. (2017). Konsep Value For Money: Alternatif Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur. *ASSETS: jurnal ekonomi, manajemen, dan akuntansi*. [online] Volume 7, Nomor 1. Tersedia di: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/3936> [Diakses pada 1 Juli 2020]

Putra (2015). Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. [online] Volume 11(1). Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/10543/8596> [Diakses pada 1 Juli 2020]

Saepulloh. R. (2019). Legislator: Pengelolaan Aset Kabupaten Cianjur Belum Optimal. *Warta Ekonomi.co.id*. Tersedia di: <https://www.wartaekonomi.co.id/read224993/legislator-pengelolaan-aset-kabupaten-cianjur-belum-optimal.html>. [Diakses 06 Juni 2020]

- Sanjaya. (2019). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. [online] Volume: 2460-0585. Tersedia di: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/729/> [Diakses pada 1 Juli 2020]
- Santoso, F. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. *Jurnal Akuntansi*, 3(2).
- Sari. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*. [online] Volume 3(1). Tersedia di: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/11224> [Diakses pada 1 Januari 2021]
- Sasmita. (2019). Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kab. Oki Sumatera Selatan Periode 2017-2019. *Jurnal Manajemen Bisnis*. [online] Volume 9(2). Tersedia di: <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/JAST/article/view/4221> [Diakses pada 1 Juli 2020]
- Selamet. I. (2018). Cianjur Hanya Dapat WDP. *cianjurekspres.net*. Tersedia di: <https://www.cianjurekspres.net/cianjur-hanya-dapat-wdp/> [Diakses 06 Juni 2020]
- Setiyaningrum, I. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta*. skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____ (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulastiningsih. (2017). Pengukuran Kinerja Berbasis Value For Money Studi Pada SMP Negeri 2 Banjarnegara. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*. [online] Volume 23(1). Tersedia di: <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/168> [Diakses pada 22 Januari 2021]

- Suwandi. dan Riharjo. (2017). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. [online] Volume 6(2). Tersedia di: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/77/67/> [Diakses pada 22 Januari 2021]
- Ulfa. et. al. (2018) Analisis Kinerja Apbd Dengan Pengukuran Value For Money Pemerintah Kota Malang (Tahun Periode 2011-2015). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. [online] Volume 6(1). Tersedia di: <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma> [Diakses pada 22 Januari 2021]
- Wira. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bintan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*. [online] Volume 23(2). Tersedia di: <https://jurnal.umrah.ac.id/archives/3134> [Diakses pada 05 Agustus 2020]
- Zamaludin, A and Annurul, D S (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value For Money Pada Satuan Kerja Balai Penelitian Tamanan Hias Kab. Cianjur'. *Jurnal Akunida*. [online] Volume 6(2). Tersedia di: <https://unida.ac.id/ojs/JAKD/article/view/3568> [Diakses pada 02 Februari 2021]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Dwi Komada
Alamat : Kp. Mayak Kaler Rt.03/05, Kec. Cibeber
Kab. Cianjur, 43262
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 30 Mei 2000
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : MI Al-Hidayah Mayak
• SMP : MTs Yaspi Al-Falah cibeber
• SMK : SMK Yaspi Al-Falah cibeber
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2021
Peneliti,

(Fitri Dwi Komada)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Uraian Pertanyaan Wawancara

KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

Dalam rangka melengkapi data yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir, bersama ini saya bernama:

Nama : Fitri Dwi Komada

Judul Penelitian : Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020

Universitas : Universitas Pakuan

Dengan ini menyampaikan kuesioner penelitian mengenai “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Periode Tahun Anggaran 2016-2020 ”. Adapun hasil dari kuesioner ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan tugas akhir pada program sarjana Universitas Pakuan. Peneliti memahami waktu saudara/i sangatlah terbatas dan berharga, namun peneliti juga berharap kesediaan saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan bersedia menjawab secara lengkap kuesioner yang terlampir.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan saudara/i telah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini.

Peneliti

Fitri Dwi Komada

	Daftar Pertanyaan	Jawaban
	Indikator value for money	
	1. Ekonomis	
a.	Apakah pemda memilih sumber daya secara optimal dan mengalokasikan sumber daya tersebut dengan baik? Mohon jelaskan.	
b.	Apakah pemda melakukan pembelian barang dan jasa dengan kualitas yang tinggi pada harga yang rendah? Mohon jelaskan.	
c.	Apakah pemda telah mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan ? Mohon jelaskan.	
d.	Apakah pemda selalu mempertimbangkan penggunaan sumber daya agar sesuai dengan tujuan dan ketepatan waktu? Mohon jelaskan.	
	2. Efisiensi	
a.	Apakah pemda melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan? Mohon jelaskan.	
b.	Apakah pemda sudah melindungi dan memelihara sumber daya secara memadai? Mohon jelaskan.	
c.	Pada tahun anggaran 2016-2020, apakah pemda menghasilkan output yang maksimal dengan sumber daya yang dimilikinya pada saat itu? Mohon jelaskan.	
d.	Pada tahun anggaran 2016-2020, apakah pemda sudah menggunakan	

	output pada tingkat kapasitas optimal? Mohon jelaskan.	
	3. Efektivitas	
a.	Apakah pemda selalu melakukan identifikasi dan evaluasi mengenai faktor-faktor yang menghambat kinerja? Mohon jelaskan.	
b.	Apakah pemda selalu mempertimbangkan alternatif lain untuk melaksanakan tujuan program kegiatan yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya terendah dan tercapainya tujuan? Mohon jelaskan.	
c.	apakah pemda melakukan pengukuran <i>prospektif</i> terkait perencanaan kinerja di masa yang akan datang? Mohon jelaskan.	
d.	Apakah pemda melakukan pengukuran <i>retrospektif</i> terkait penilaian kinerja di masa lalu? Mohon jelaskan.	
e.	Apakah pemda melakukan pelaporan ukuran yang sah dan dapat di pertanggungjawabkan mengenai efektivitas program? Mohon jelaskan.	
	Kinerja Keuangan	
a.	Sejauhmana kinerja pengelolaan APBD secara desentralisasi di Pemerintah Daerah Kab. Cianjur pada tahun 2016-2020?	
b.	Bagaimana pengelolaan APBD khususnya pendapatan daerah dalam meningkatkan PAD di Pemerintah Daerah Kab. Cianjur pada tahun 2016-2020?	
c.	Bagaimana pengelolaan APBD khususnya belanja daerah dalam meningkatkan PAD di Pemerintah	

	Daerah Kab. Cianjur pada tahun 2016-2020?	
d.	Bagaimana pengelolaan APBD khususnya pembiayaan daerah dalam meningkatkan PAD di Pemerintah Daerah Kab. Cianjur pada tahun 2016-2020?	
e.	Apa masalah yang sering dihadapi dalam kinerja pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kab. Cianjur pada tahun 2016-2020?	
f.	Faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kab. Cianjur pada tahun 2016-2020?	

LAMPIRAN 2 Dokumentasi Wawancara



LAMPIRAN 3 Surat Pengantar Penelitian Fakultas



Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 914 /WD.I/FE-UP/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

28 Desember 2020

Kepada : Yth. Pimpinan
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Pangerang Hidayatullah No.26 Sawag Gede Kec.Cianjur Kel.Cianjur
Cianjur

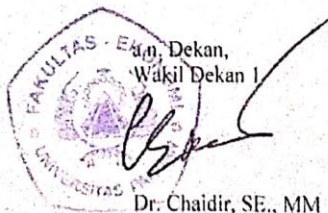
Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Fitri Dwi Komada
NPM : 022117278
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


 Dr. Chaidir, SE., MM

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FE - UP (Sebagai Laporan).

LAMPIRAN 4 Surat Pengantar Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Cianjur, 27 Mei 2021

Nomor : 070.1/INTEL-POA.321/Kesbangpol
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten
 Cianjur

di-

TEMPAT

Dasar :

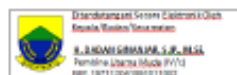
1. Menunjuk Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Perubahan Terakhir Nomor: 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
4. Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cianjur;
5. Surat dari Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi, Nomor : 914WD.1/PE-UP/V/2021, Tanggal : 11 Mei 2021, Hal : Permohonan izin Penelitian

Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Cianjur dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : Fitri Dwi Komada
 Alamat : Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor
 Lokasi : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
 Waktu : 27 Mei 2021 s.d 27 Agustus 2021
 Judul Penelitian : -
 Penanggung Jawab : Dr. Chaldir, SE., MM
 Jabatan : Wakil Dekan
 Nama Lembaga : Universitas Pakuan
 Catatan : Hasil Penelitian agar dilaporkan kepada Badan Kesbangpol.

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan dicampalkan kepada :

1. Yth. Wakil Dekan Universitas Pakuan;
2. Yth. Mahasiswa yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 5 Surat Keterangan Penelitian di Sekretariat
Pemerintah Daerah**

 **PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Siti Jenah No 31. Telp. PABX (0263) 261892-261896 / FAX 263686 Cianjur 43211

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 000 / 2885 / Um-Keu/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RACHMAT HARTONO, SH,M.AP
NIP : 197402201997031003
Pangkat / Gol Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Asisten Administrasi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRI DWI KOMADA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 30 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Pakuan Bogor
Alamat : Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor
Judul Penelitian : Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2018
Waktu / Lama Penelitian : 1 Bulan
Tempat Penelitian : Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur

Adalah benar telah selesai melakukan penelitian / survey pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur selama 1 (satu) bulan pada bulan Mei 2021 untuk penyelesaian skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 10 Juni 2021
ASISTEN ADMINISTRASI

RACHMAT HARTONO, SH,M.AP
NIP. 197402201997031003